

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SISTEM PERTAHANAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI WILAYAH IKN

Oleh

Edi Saputra, S.I.P., M.Han.

No. Peserta: 024

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul ***“Sistem Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman Di Wilayah IKN”***.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Laksda TNI (Purn) Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,

Edi Saputra S.I.P., M.Han.
Nomor Peserta: 024



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Saputra S.I.P., M.Han.

Pangkat : Kolonel Inf

Jabatan : Pamen Denmabesad

Instansi : MABES TNI AD

Alamat : Mess MABESAD Pejambon Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis ini adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2023
Penulis,

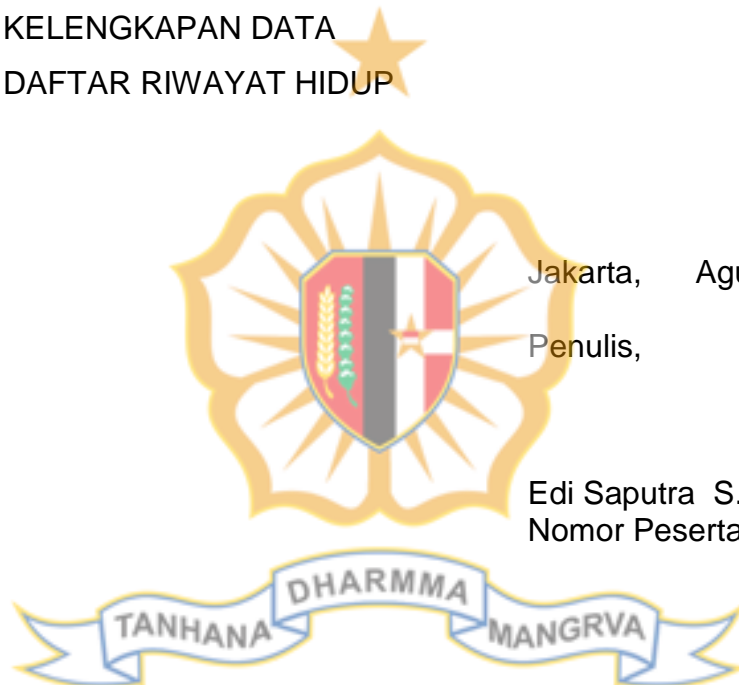
Edi Saputra S.I.P., M.Han.
Kolonel Inf NRP 11940027940773

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 7 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika | 8 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 9 |
| 6. Pengertian | 9 |
| BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN..... | 13 |
| 7. Umum..... | 13 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan..... | 13 |
| 9. Data dan Fakta | 15 |
| 10. Kerangka Teoretis | 25 |
| 11. Lingkungan Strategis..... | 26 |
| BAB III. PEMBAHASAN..... | 37 |
| 12. Umum..... | 37 |
| 13. Ancaman di Wilayah | 37 |
| 14. Sistem pertahanan di wilayah IKN dalam menghadapi ancaman saat ini | 45 |
| 15. Membangun sistem pertahanan yang bersifat | |

| | |
|---|-----------|
| semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN..... | 54 |
| BAB IV. PENUTUP | 77 |
| 16. Simpulan..... | 77 |
| 17. Rekomendasi..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| DAFTAR LAMPIRAN: | |
| 1. ALUR PIKIR | |
| 2. KELENGKAPAN DATA | |
| 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



Jakarta, Agustus 2023

Penulis,

Edi Saputra S.I.P., M.Han.
Nomor Peserta: 024

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. PETA RENCANA IKN
- GAMBAR 2. KONDISI PENDUDUK DI INDONESIA
- GAMBAR 3. KRISIS KETERSEDIAAN AIR DI PULAU JAWA
- GAMBAR 4. KONVERSI LAHAN DI PULAU JAWA
- GAMBAR 5. PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI IKN
- GAMBAR 6. PROYEKSI PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR (2020-2050)
- GAMBAR 7. STRATEGI PERTAHANAN BERLAPIS
- GAMBAR 8. GELAR SATUAN TNI AD DI WILAYAH IKN SAAT INI
- GAMBAR 9. GELAR SATUAN TNI AL DI WILAYAH IKN SAAT INI
- GAMBAR 10. GELAR SATUAN TNI AU DI WILAYAH IKN SAAT INI
- GAMBAR 11. *JOINT TECHNICAL ARCHITECTUR (JTA)*
- GAMBAR 12. POLA SISTEM PERTAHANAN SEMESTA DALAM KERANGKA K4IPP
- GAMBAR 13. KONSEP GELAR SATUAN TNI



BAB I

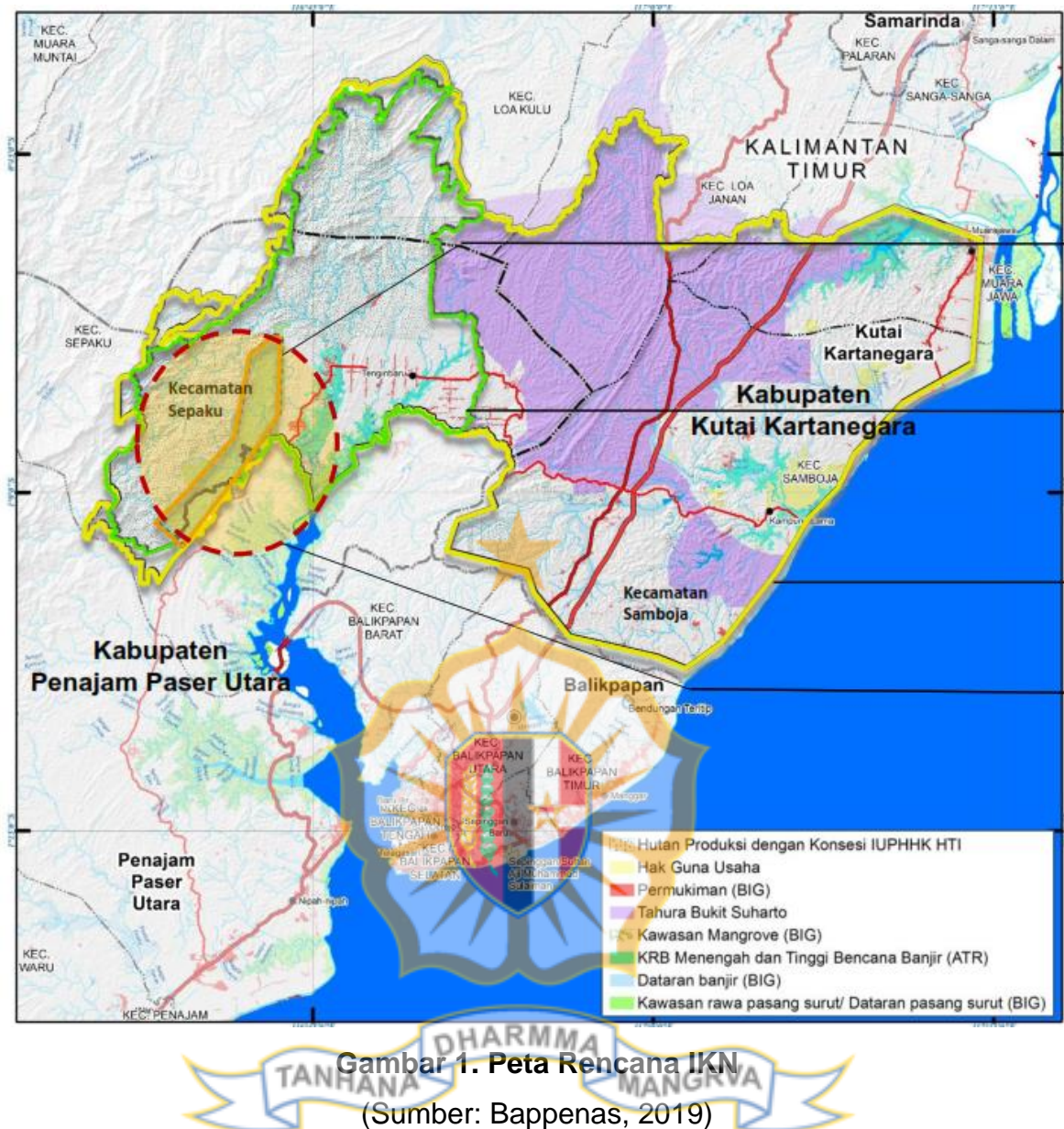
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan Ibukota suatu negara merupakan wilayah krusial yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya dari berbagai ancaman yang ada. Karena wilayah tersebut dijadikan sebagai Pusat Pemerintahan, perekonomian dan segala aktivitas lainnya yang kesemuanya memiliki tujuan mencapai cita-cita nasional sebagaimana telah diamanatkan di dalam UUD 1945. Terkait dengan hal tersebut, Ibukota Negara yang dinilai sebagai *Center of Gravity* (CoG) saat ini di Jakarta dipandang memiliki berbagai persoalan seperti penduduk Indonesia 57% terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi Pulau Jawa 59% terhadap PDB sehingga berdampak pada ketimpangan pendapatan dengan daerah lain, krisis air, urbanisasi yang tinggi, rawan bencana banjir, gempa bumi, penurunan tanah dan lain sebagainya.¹ Kondisi ini dianggap kurang kondusif dalam mewujudkan tujuan nasional sehingga pemerintah pun mengambil langkah strategis melalui berbagai pengkajian untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lokasi IKN di Kalimantan Timur dipandang sebagai posisi strategis yang berada di tengah-tengah Indonesia. Hal ini memungkinkan akses dan konektivitas yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, pemindahan IKN ke wilayah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan integrasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam upaya pembangunan nasional. Selain itu, keputusan untuk memindahkan IKN juga dipengaruhi oleh kedekatan wilayah IKN dengan kota-kota perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Kedekatan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di wilayah IKN secara lebih efektif. Selain itu, adanya infrastruktur yang relatif lengkap di wilayah Kalimantan Timur, seperti bandara internasional dan jaringan transportasi yang baik, juga menjadi pertimbangan penting dalam rencana pemindahan IKN. Adapun skema dari rencana calon IKN, sebagai berikut:

¹ Bappenas. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. (Jakarta: Bappenas, 2021).



Dalam perkembangannya pemilihan wilayah tersebut sebagai pengganti Ibukota Negara tidak serta merta dilakukan begitu saja karena sebelumnya telah didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya hingga terkait masalah pertahanan-keamanan. Dalam konteks pertahanan tentu berimbang terutama bagi TNI agar dapat menjalankan perannya di dalam menjaga serta melindungi IKN (Pengamanan Ibukota). Karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa IKN nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan. Andreas W Daum menjelaskan pentingnya Ibu kota negara sehingga perlu diperhatikan masalah pertahanannya karena wilayah tersebut

melaksanakan berbagai kegiatan seperti administratif negara, pelestarian budaya, sejarah dan sebagainya.² Mengenai keberadaan Ibukota yang memiliki peran krusial juga ditegaskan oleh Vadim Rossman, dimana ia menganggap Ibukota negara sebagai pusat kekuasaan tinggi suatu negara.³ Oleh sebab itu dalam beberapa peperangan yang terjadi, Ibukota negara dijadikan target penting yang perlu ditaklukkan jika ingin menjadi pemenang dalam sebuah pertempuran. Untuk itu, maka sudah selayaknya keberadaan Ibukota dibentengi dengan pertahanan negara yang kuat sehingga mampu menghadapi kompleksitas ancaman yang berupa ancaman Militer, Non Militer dan Hibrida.

Laporan MABES TNI perihal Rencana Pembangunan Satuan TNI di IKN Nusantara tahun 2022 memperkirakan terdapat beberapa ancaman yang dinilai dapat mengganggu jalannya pembangunan IKN di Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Ancaman Militer yang identik dengan penggunaan unsur militer secara fisik, seperti: invasi, kedaulatan wilayah udara, sengketa perbatasan, sabotase, spionase dan sebagainya. Ancaman ini memiliki dampak serius pada keamanan nasional suatu negara karena mampu menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan sumber daya nasional, serta menimbulkan kerugian-kerugian lainnya.
- b. Ancaman Non Militer merupakan ancaman yang bersifat non fisik, seperti: aksi teror, bencana alam, konflik sosial, kecelakaan pelayaran dan penerbangan serta lain sebagainya. Ancaman ini memiliki dampak multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan sehingga perlu dipahami dan diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap jalannya pembangunan nasional.
- c. Ancaman Hibrida merupakan jenis ancaman yang dikombinasikan dari berbagai unsur yang ada. Ancaman ini berupa penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir dan lain sebagainya. Ancaman jenis ini memiliki sifat yang kompleks dan seringkali sulit untuk dideteksi, sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam menghadapinya.

² https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/22/sejarah-ibu-kota-negara-simbol-representasi-bangsa-yang-cenderung-elitis?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink, diakses 6 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

³ *Ibid.*

Melihat kompleksitas ancaman yang ada tentu diperlukan upaya penanganannya tidak hanya pada kemampuan pertahanan dimensi militer, namun juga kemampuan pertahanan dengan dimensi non-militer sebagai wujud dari sistem pertahanan semesta. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian individu, serta tata kelola institusi dan sistem organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Kondisi ini penting dipahami karena dalam membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta diperlukan pengelolaan berbagai sumber daya secara maksimal, termasuk pelibatan pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, Pemerintah (K/L) dan masyarakat agar negara memiliki Pertahanan yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada guna menjaga keutuhan NKRI.

Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan (komponen utama) menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan juga keputusan politik negara. Tugas pokok TNI sebagai komponen utama disebutkan secara khusus dalam UU No. 34 Tahun 2004 pasal 7, dan yang menjadi fokus utama dalam penulisan ini pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas pokok TNI tidak hanya berkaitan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) tetapi juga mencakup Operasi Militer selain Perang (OMSP). Regulasi tersebut menegaskan bahwa TNI diposisikan sebagai ujung tombak dalam upaya mempertahankan NKRI sehingga dituntut mampu mendukung tercapainya pembangunan nasional terutama di wilayah IKN.

Mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN, sistem pertahanan yang diterapkan yaitu pertahanan semesta (*total defence*) yang terpadu, *deterrence*, defensif aktif dan strategi pertahanan berlapis.⁴ Model pertahanan tersebut mengusung gelar pembangunan pertahanan tidak hanya terfokus pada pengerahan tiga matra TNI yang ada yaitu Matra Darat (TNI AD), Matra laut (TNI AL), dan Matra Udara (TNI AU) namun diharapkan juga pemerintah mampu memberikan dorongan agar seluruh komponen Bangsa terlibat aktif di dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta sebagai wujud bela Bangsa dan Negara Indonesia. Kebijakan ini perlu dipahami secara komprehensif karena pembangunan Sistem pertahanan khususnya di wilayah IKN mendasarkan pada potensi dan kompleksitas ancaman yang semakin hari kian berkembang

⁴ Kementerian Pertahanan. Paparan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan: Konsep Pembangunan Sistem Pertahanan IKN. (Jakarta: Kemhan, 2022).

sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang multidimensional. Melalui pembangunan sistem pertahanan yang baik, maka setiap ancaman potensial dapat secara cepat dan tepat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, maka sudah selayaknya Indonesia memiliki sistem pertahanan terpadu yang mampu mendukung berjalannya pemerintahan atas berbagai program atau kebijakan yang dilaksanakan khususnya pada pembangunan Sistem pertahanan di wilayah IKN.

Pemindahan ibukota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur merupakan langkah besar yang diambil dalam upaya mencapai tujuan nasional sehingga diperlukan sistem pertahanan yang mendukung. Oleh karena itu, aspek sistem pertahanan yang bersifat semesta harus diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik. Penerapan Sishanta merupakan salah satu cara yang dipandang cukup efisien karena dipandang mampu mengatasi tantangan dan hambatan yang sangat kompleks melalui jalinan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, Ibukota baru dapat menjadi wilayah yang aman dan nyaman bagi warganya. Pemerintah pada konteks ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem pertahanan yang bersifat semesta dapat bekerja dengan baik. Pemerintah juga harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem ini agar ibukota baru dapat terlindungi dengan baik.

Namun demikian dalam upaya membangun sistem pertahanan tersebut, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan, diantaranya: 1) Keterbatasan dari segi kuantitas SDM TNI dalam mendukung pembangunan Sistem Pertahanan di wilayah IKN; 2) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan TNI dalam mendukung pembangunan sistem Pertahanan di wilayah IKN; 3) Belum adanya keterpaduan konsep Sishanta khususnya pada level operasional dalam mendukung pembangunan sistem Pertahanan di wilayah IKN; dan 4) Masih adanya tumpang tindih aturan, salah satunya regulasi yang mengatur komando pergerakan seluruh komponen pertahanan negara terutama dalam pelaksanaan tugas OMSP. Persoalan-persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena memiliki dampak strategis dalam pembangunan IKN yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya membangun sistem pertahanan khususnya di wilayah IKN jelas membutuhkan kerjasama berbagai komponen Bangsa sehingga terbangun Sistem pertahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman. Hal ini sejalan dengan riset Jean Gottmann dikutip dalam Kompas.id yang menyatakan bahwa Ibukota pada dasarnya dapat bertindak sebagai pemersatu negara.⁵ Untuk itu setiap komponen bangsa perlu saling bekerjasama di dalam membangun sistem pertahanan yang diharapkan. Mengingat sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ancaman tidak hanya terbatas pada lingkup militer, non militer dan hibrida, yang dinilai memiliki potensi membahayakan kedaulatan negara, karena target operasinya memiliki cakupan yang luas. Termasuk dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi informasi dan sebagainya. Kondisi ini menunjukkan pelaku tidak terpaku pada Negara, namun juga berasal dari aktor non negara dan juga kelompok-kelompok sehingga tentu membutuhkan penanganan yang terukur. Mengacu uraian tersebut maka penulis memandang perlu untuk menelaah lebih lanjut dalam judul **“Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN”**.

2. Rumusan Masalah

Keberadaan IKN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki peran strategis dalam keberlangsungan suatu negara. Untuk itu IKN perlu didukung dengan sistem pertahanan yang baik agar terwujud tatanan kehidupan bernegara yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan ibukota baru dengan mempertimbangkan integrasi yang baik antara pembangunan fisik, pertahanan, dan keamanan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi kehidupan bernegara dan masyarakat. Namun demikian dalam upaya membangun sistem pertahanan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, terutama kompleksitas ancaman yang semakin berkembang sehingga berpotensi dapat menimbulkan instabilitas nasional, dimana ancaman yang dimaksud yakni ancaman militer dan non militer. Ancaman militer sebagaimana telah disinggung

⁵ Ibid.

merujuk pada segala bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer suatu negara atau kelompok untuk menggunakan kekuatan militer mereka secara agresif untuk menyerang, menaklukkan atau menguasai wilayah, sumber daya atau kepentingan strategis suatu negara atau kelompok. Ancaman militer dapat memiliki dampak serius pada keamanan nasional suatu negara dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan sumber daya nasional serta menimbulkan kerugian yang besar. Sedangkan Ancaman nonmiliter merujuk pada ancaman terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara atau kelompok yang tidak berasal dari kekuatan militer. Ancaman nonmiliter dapat berasal dari berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dalam penulisan ini yaitu: **“Bagaimana mewujudkan Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN?”**. Mengacu rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut yaitu:

- a. Apa saja ancaman yang terdapat di wilayah IKN?
- b. Bagaimana sistem pertahanan di wilayah IKN dalam menghadapi ancaman saat ini?
- c. Bagaimana membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Secara garis besar penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan perihal Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN.

b. Tujuan

Taskap ini bertujuan untuk dijadikan sumbangan pemikiran penulis secara konseptual dan strategis yang berupa masukan kepada para pemangku kebijakan terkait membangun Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.

a. Ruang lingkup

Melihat cakupan yang luas terkait dengan materi yang dibahas, maka penulisan taskap ini dibatasi pada ancaman Militer dan Non Militer yang terdapat di wilayah IKN, sistem pertahanan menghadapi ancaman saat ini, dan upaya membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN.

b. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan naskah ini, sistematika yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian awal taskap yang berusaha menjelaskan beberapa hal, diantaranya latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian.

2) Bab II Landasan Pemikiran

Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, yaitu: Peraturan Perundang-undangan, kerangka teoretis, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN.

3) Bab III Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran subyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang meliputi penggambaran ancaman Militer dan Non Militer di wilayah IKN saat ini, sistem pertahanan menghadapi ancaman, dan upaya membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN.

4) Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan terkait sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode

Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dalam metode didasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah perspektif ketahanan nasional, dengan mengkaji teori, konsep, dan landasan hukum/regulasi yang relevan dengan variabel penelitian ini.

6. Pengertian.

a. Sistem

Sekumpulan sub sistem atau komponen terkait yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.⁶ Dalam sistem terdapat berbagai unsur yang berhubungan sehingga perlu dipahami dengan baik agar mampu mendukung tujuan yang diharapkan. Selain itu dalam sistem juga terkait menerima umpan balik dari lingkungannya atau dari output yang dihasilkan. Umpan balik ini dapat membantu sistem untuk beradaptasi dan memperbaiki kinerjanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Komprehensif

Sesuatu yang bersifat luas dan lengkap dengan memberikan perhatian dengan sangat rinci, mulai dari aspek terkecil hingga terbesar.⁷ Definisi ini memberikan pemahaman bahwa komprehensif merupakan keseluruhan atas unsur yang ada sehingga perlu dipahami dengan baik. Dengan kata lain komprehensif merupakan kemampuan untuk melihat gambaran besar serta

⁶ Sri Mulyani. Metode Analisis dan Perancangan Sistem. (Bandung: Abdi SisteMatika, 2016).

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

rincian-rincian yang lebih kecil, mengenali pola-pola, dan mengidentifikasi kaitan-kaitan yang mungkin tidak langsung terlihat. Hal ini sering melibatkan penggabungan pengetahuan, pengalaman, dan analisis kritis.

c. Indeks Ketahanan Nasional Indonesia (IKNI)

Sistem pengukuran atas gatra yang dirinci menjadi variabel terkecil sehingga dihasilkan suatu parameter yang terukur atas ketahanan nasional.⁸ Melalui IKNI dapat dijadikan rujukan dalam melihat pencapaian ketahanan nasional. Selain itu melalui IKNI dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi tingkat ketahanan suatu negara terhadap berbagai ancaman dan risiko, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indeks semacam ini biasanya mencakup berbagai indikator dan variabel yang mengukur kesiapan suatu negara dalam menghadapi berbagai tantangan.

d. Program Pembangunan Nasional (PROGBANGNAS)

Rancangan kegiatan nasional untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan.⁹ Program Pembangunan Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Probangnas berisi rencana dan strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur negara dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu perlu menciptakan Program Pembangunan Nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan pada data dan analisis yang akurat. Hal ini akan membantu negara mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.

e. Komponen Utama

Tentara Nasional Indonesia yang dipersiapkan di dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan.¹⁰ Unsur TNI sebagai komponen penting di dalam menjalankan tugas pertahanan karena berbagai kemampuan yang

⁸ R.E. Fisher, et. al, *Constructing a Resilience Index for the Enhanced Critical Infrastructure Protection Program*, Argonne national Laboratory, AN/DIS-10-9, Agustus 2010.

⁹ PP No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

¹⁰ Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

dimilikinya. Namun, penting untuk diingat bahwa TNI juga harus beroperasi dalam kerangka hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

f. Komponen Cadangan

Bagian dari sumber daya nasional yang dipersiapkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.¹¹ Dengan berbagai kemampuan yang dipersiapkan dapat diberdayakan untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama. Penting untuk merencanakan dan mengelola komponen cadangan dengan baik, termasuk dalam hal pelatihan, pemeliharaan keterampilan, dan rencana pengerahan dalam situasi darurat. Komponen cadangan adalah aset penting dalam memastikan kesinambungan dan ketangguhan pertahanan negara.

g. Komponen Pendukung

Bagian sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.¹² Hal ini memberikan pemahaman bahwa komponen pendukung dalam pertahanan negara memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasi militer, komponen pendukung memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung dan memastikan keberhasilan upaya pertahanan negara.

h. Sistem Pertahanan Semesta

Sistem yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang ada.¹³ Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk militer, polisi, pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang kompleks seperti ancaman nonmiliter, terorisme, kejahatan lintas batas dan bencana alam. Dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

sistem pertahanan yang bersifat semesta, militer tetap memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional tetapi juga bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengintegrasikan kebijakan serta kegiatan pertahanan dan keamanan. Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut serta dalam pengambilan keputusan, penyebaran informasi dan pengawasan serta partisipasi dalam program-program pertahanan dan keamanan nasional. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Sistem ini menekankan atas peran aktif seluruh komponen bangsa di dalam mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang kuat atas kompleksitas ancaman yang ada.



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum.

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan regulasi atau aturan, kerangka teoretis, serta pustaka lainnya yang digunakan berkaitan dengan Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN. Hal ini perlu dijelaskan secara baik agar terbangun pemahaman atas materi yang dibahas sehingga dapat membantu proses penyusunan pada bab berikutnya. Sebagaimana pada bagian teori dan konsep yang relevan dengan pokok bahasan digunakan untuk menjawab beberapa persoalan, sedangkan tinjauan peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai landasan hukum untuk memahami kebijakan yang ada, dan tinjauan pustaka sebagai data empiris yang menjadi landasan dalam penulisan Taskap.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Mengacu pasal 4 menjelaskan pertahanan negara memiliki tujuan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Konsep pertahanan negara tersebut perlu diwujudkan melalui pelibatan seluruh komponen pertahanan, termasuk komponen utama, cadangan dan pendukung yang disebut dengan sistem pertahanan semesta. Esensi dari konsep pertahanan tersebut menempatkan TNI sebagai elemen utama yang bertanggung jawab dibantu dengan elemen negara lainnya memberikan jaminan keselamatan negara dari segala bentuk ancaman di bidang pertahanan. Dalam konteks tersebut UU ini digunakan sebagai dasar pelibatan unsur-unsur terkait untuk membangun sistem pertahanan yang mampu melindungi dari berbagai ancaman dan gangguan yang kian berkembang.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pasal 7 ayat (1) dari UU tersebut menyatakan TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, dan melindungi segenap bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan. TNI melaksanakan tugasnya melalui OMP dan OMSP, atau dengan kata lain keterlibatan TNI difokuskan pada pertahanan semesta dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada di wilayah IKN. Keterlibatan TNI atas berbagai kemampuan yang dimiliki menjadi sangat dibutuhkan terutama di dalam mendukung pembangunan di IKN.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pada pasal 3 dari UU tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional pada dasarnya bertujuan untuk mentransformasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional yang merupakan kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan nasional. Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa pengelolaan dapat dilakukan melalui bela negara, penataan komponen pendukung, komponen cadangan dan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi. Regulasi ini memberikan pemahaman perlunya pengelolaan sumber daya nasional secara baik dengan memaksimalkan keterlibatan seluruh komponen negara.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

IKN pada dasarnya merupakan salah satu wilayah strategis karena daerahnya dijadikan ibu kota negara sebagaimana diatur UU terkait. Sebagai sebuah ibu kota negara tentu akan banyak berbagai aktivitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan di wilayah tersebut sehingga perlu dipersiapkan secara baik. Mengacu pasal 2 bahwa IKN bertujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; motor penggerak ekonomi nasional; dan simbol representasi atas keberagaman yang ada di Indonesia didasarkan

pada ideologi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar mampu mendukung percepatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

e. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara.

Pasal 1 menjelaskan perihal pengintegrasian berbagai komponen negara baik yang bersifat militer maupun nonmiliter dalam menanggulangi berbagai ancaman yang ada. Integratif yang dimaksud merupakan perwujudan di dalam membangun keterpaduan semua komponen pertahanan yang terdiri atas komponen utama, cadangan dan pendukung yang dibangun untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

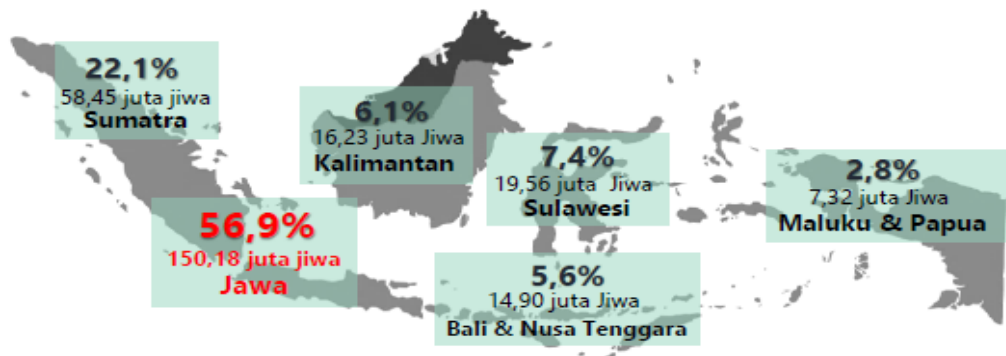
9. Data & Fakta

a. Urgensi IKN

Pemindahan Ibu Kota di Indonesia dalam perjalanannya telah direncanakan sejak lama yakni pada kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno. Pemindahan tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan yang pada intinya diharapkan mampu mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Hal ini perlu dipahami karena pemindahan ibu kota negara merupakan upaya strategis yang perlu dilakukan secara matang sehingga tepat sasaran. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya perihal urgensi pindahnya Ibu Kota Negara disebabkan oleh:

- 1) Terkonsentrasi jumlah penduduk di pulau Jawa yang mencapai 57%. Kondisi ini menjadikan penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan jumlah penduduk tersebut berimbas pada belum meratanya pembangunan ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan. Penyebaran penduduk yang belum merata tersebut menjadi salah satu alasan kuat dilakukan pemindahan ibu kota dengan harapan mampu mewujudkan pembangunan nasional yang merata.

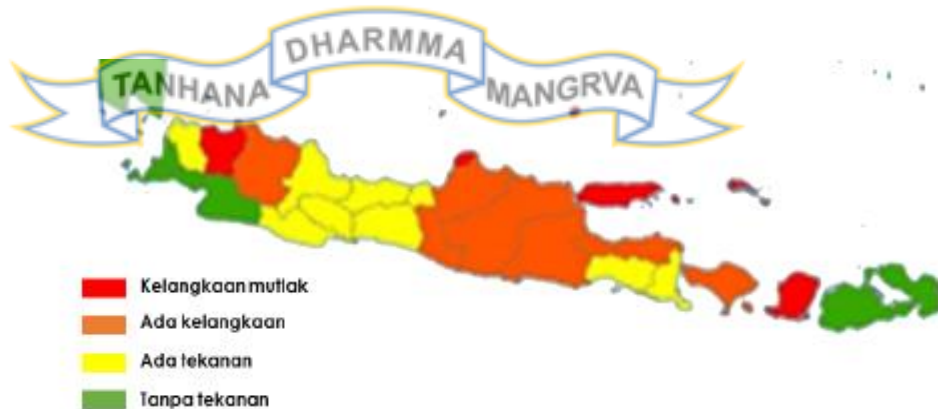
Gambar 2. Kondisi Penduduk di Indonesia



Sumber: Bappenas (2019)

2) Krisis air di Pulau Jawa terutama wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan penduduk. Menurunnya kualitas kesehatan penduduk secara tidak langsung berdampak pada berbagai kehidupan lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka tak dapat dipungkiri bahwa faktor lingkungan khususnya ketersediaan air menjadi hal yang penting di dalam pemindahan ibu kota negara

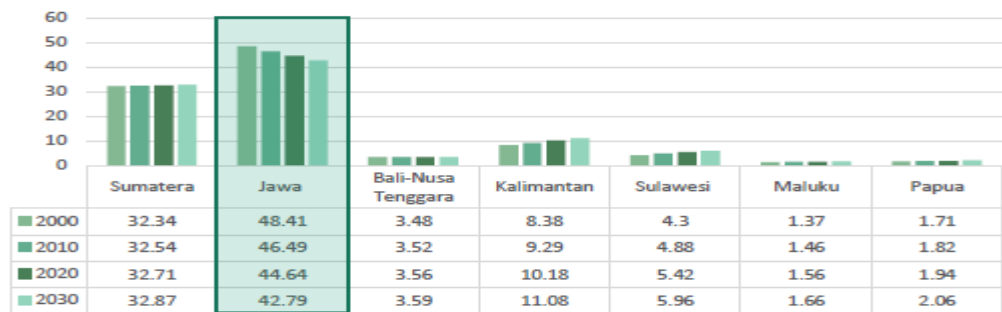
Gambar 3. Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa



Sumber: Bappenas (2019)

3) Eksploitasi lahan yang kurang terkendali terjadi di pulau Jawa sehingga berdampak pada kelestarian lingkungan serta berbagai pertimbangan lainnya.

Gambar 4. Konversi Lahan di Pulau Jawa



Sumber: Bappenas (2019)

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui pembangunan IKN Nusantara tidak hanya bertujuan menjawab tantangan nasional, tetapi juga dalam skala global. Pembangunan IKN diharapkan mampu mewujudkan pemerataan akses serta pertumbuhan secara nasional. Karena sebagaimana diketahui IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep *smart*, *green*, serta *hub* bagi perekonomian nasional dan regional. Dalam mewujudkan visi tersebut tentu dibutuhkan kapasitas pertahanan mumpuni untuk melindungi IKN sebagai obyek vital nasional dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas. Beberapa pertimbangan lain yang dijadikan rujukan dalam pemindahan ibukota negara yakni didasarkan beberapa hal diantaranya:

- Kalimantan Timur dianggap lebih aman dari ancaman bencana sehingga stabilitas dapat lebih terjaga. Kondisi Kalimantan Timur yang dipandang lebih stabil dibandingkan dengan daerah sebelumnya menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat keamanan yang lebih baik terutama dari ancaman bencana.
- Kondisi penduduk yang dinilai lebih terbuka sehingga terjadinya konflik dapat diminimalisir. Melalui keterbukaan masyarakat diharapkan akan mampu terbangun sebuah tatanan yang lebih baik.
- Memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu jalur perdagangan yang sering kali digunakan. Kondisi ini tentu perlu

dimanfaatkan secara baik agar dapat memberikan pengaruh positif dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional.

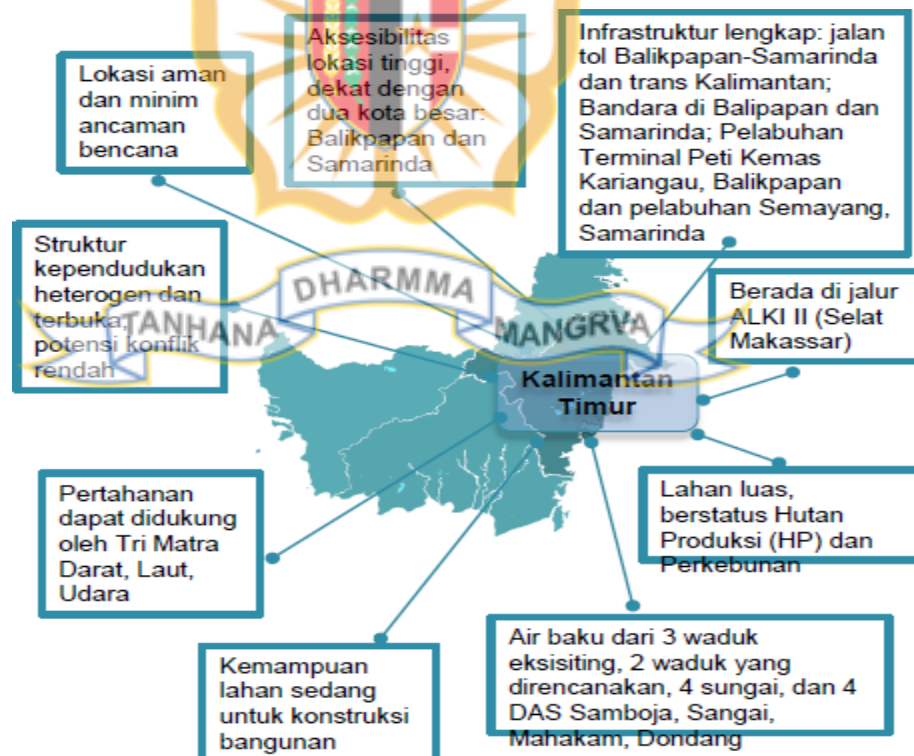
d) Ketersediaan air serta lain sebagainya yang cukup baik dibandingkan Pulau Jawa. Kebutuhan atas air merupakan hal yang fundamental bagi masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian khusus di dalam pembangunan Ibukota Negara.

e) Luasnya wilayah yang dapat menjadi nilai plus untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan pulau Jawa tentu Kalimantan memiliki luas wilayah yang memadai terutama di dalam pembangunan Ibukota Negara.

f) Lain-lain sebagainya.

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka pemindahan ibukota negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai IKN



Sumber: Bappenas (2022)

b. *Master Plan* Sistem Pertahanan IKN.

Sebagaimana dipahami dalam membangun IKN Nusantara tidak hanya diperlukan penyiapan infrastruktur dan lingkungan saja, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek lainnya. Untuk itu diperlukan *grand design* yang dituangkan ke dalam *master plan* khususnya bidang pertahanan. Secara umum *master plan* tersebut dirancang untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas khususnya yang terkait dengan penggunaan teknologi tinggi baik lingkup darat, udara dan laut. Oleh sebab itu *master plan* yang dibangun berusaha dirancang dengan muatan berbasis teknologi dan *local wisdom* dengan ciri khas *smart defense* serta *smart security*. Selain itu pertahanan yang dirancang juga menggunakan pertahanan aktif berlapis dimana kekuatan darat dikonsentrasikan di sisi utara-barat-timur IKN; kekuatan laut berada pada sisi timur-pantai ALKI II; dan kekuatan udara difokuskan pada sisi selatan-barat.

c. Kompleksitas Ancaman yang perlu diwaspadai dalam pembangunan IKN.

Melihat perkembangan saat ini, dimana terdapat berbagai ancaman yang perlu diwaspadai dalam pembangunan IKN karena dapat berdampak pada instabilitas terutama di wilayah tersebut. Beberapa ancaman terbagi didalam 3 pengelompokan yaitu Ancaman Militer, Ancaman Non Militer dan Hibrida. Namun dalam penulisan Taskap ini dibatasi dalam Ancaman Militer dan Non Militer diantaranya:

- 1) Ancaman Militer. Beberapa ancaman militer yang perlu diwaspadai dalam pembangunan IKN, diantaranya:
 - a) Sengketa Perbatasan. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah IKN berbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2.062 km, berhimpitan dengan ALKI II dan *choke point* atau titik sempit dunia.¹⁴ Kondisi ini sangat rentan terjadinya konflik perbatasan apalagi Malaysia sebagai anggota *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) memanfaatkan

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203131517-4-312608/bukan-perang-terbuka-ini-ancaman-serius-ri-di-ikn-nusantara>, diakses 7 April 2023 pukul 21.45 WIB.

posisinya tersebut dengan menempatkan kekuatan militer lautnya (TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia) di wilayah Sabah dimana daerah tersebut merupakan perbatasan dengan wilayah Indonesia. Contoh lainnya perihal sengketa LCS atas klaim di wilayah tersebut sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka sehingga tentu saja kondisi ini mempengaruhi stabilitas nasional khususnya di wilayah IKN.

b) Serangan Angkatan Bersenjata Negara Lain. Lokasi IKN yang berada di Kalimantan Timur cukup strategis dan bisa menciptakan perspektif geostrategis baru. Jika diperhatikan wilayah tersebut dalam radius jelajah ICBM (*intercontinental ballistic missile*) dan *rudal hypersonic* negara tertentu sehingga kondisi ini tentu sangat rentan terhadap serangan dari negara lain.¹⁵ Untuk itu pemerintah mewaspadainya dengan menggunakan teknologi *surface air missile* yang dinilai mampu melindungi IKN dari serangan rudal hingga radius 200 kilometer.

c) Ancaman Kedaulatan Atas Wilayah Udara. Sebagaimana diketahui lokasi IKN mendekati *Flight Information Region* (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina dimana wilayah tersebut merupakan jalur strategis yang mendukung kepentingan tiap-tiap negara.¹⁶ Untuk itu ancaman kedaulatan wilayah udara sangat mungkin terjadi jika tidak dipersiapkan secara baik.

d) Spionase. IKN sebagai wilayah strategis karena akan dijadikan pusat pemerintahan tentu perlu mengantisipasi berbagai ancaman yang ada, salah satunya spionase (pengintaian) yang dilakukan pihak-pihak tertentu atas kepentingannya. Bentuk pengintaian tersebut sebagai bentuk upaya awal untuk mengetahui kondisi di wilayah IKN secara utuh sehingga akan dijadikan pertimbangan untuk melakukan serangan militer. Oleh sebab itu

¹⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220109112443-4-305772/ancaman-serius-hantui-ibukota-baru-ri-serangan-rudal-china>, diakses 7 April 2023 pukul 23.13 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

pertahanan di IKN perlu dirancang dengan sangat matang agar mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman yang ada sehingga mampu mendukung terwujudnya tujuan yang diharapkan.

e) Invasi. Sebagai pusat pemerintahan, wilayah IKN tentu cukup menjadi pusat perhatian dan incaran para kombatan sehingga potensi serangan baik dari lingkup darat, udara maupun laut sangat mungkin terjadi jika tidak dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, maka diperlukan sistem pertahanan yang mampu mengantisipasi invasi tersebut agar kedaulatan dan keutuhan Negara tetap terjaga.

2) Ancaman Non Militer. Secara umum beberapa ancaman non militer yang terjadi di wilayah IKN yaitu:

a) Konflik SARA.

Meningkatnya isu SARA dalam konteks ini dapat dijabarkan menjadi penggunaan isu primordialisme, yaitu pribumi yang bertentangan dengan asing, dan isu agama terutama semakin terlihat pasca Pilpres tahun 2019 dimana terjadi segregasi dalam masyarakat berdasarkan keyakinan. Maraknya isu SARA berkembang diiringi dengan semakin banyak dan aktif masyarakat menggunakan sosial media, sehingga penyebaran informasi palsu (hoaks) dan provokatif yang menyudutkan pihak tertentu semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan instabilitas nasional, dan bahkan berpotensi menyebabkan kerusuhan di antara sipil.

b) Teorisme dan Radikalisme.

Isu ini merupakan persoalan negara yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Selain para pelaku adalah warga sipil dan dapat membangun jaringan dengan para punggawa teroris di luar kawasan, keberadaannya menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Setelah peristiwa peledakan bom di tiga gereja di Surabaya dan diikuti dengan beberapa aksi bom bunuh diri lainnya, Indonesia dapat dinyatakan sedang mengalami kondisi

darurat terkait persoalan terorisme di dalam situasi keamanan nasionalnya, sehingga dalam penanganannya diperlukan hubungan sipil-militer yang baik. Karena sebagaimana diketahui penanganan paham radikal membutuhkan pendekatan yang multidimensional.

c) Penyebaran Hoaks.

Penyebaran hoaks di era digital saat ini semakin massif. Berdasarkan Survei *Katadata Insight Center* (KIC) menunjukkan 76% responden cenderung menggunakan medsos sebagai sumber informasi yang paling mudah diakses.¹⁷ Kondisi ini tentu memerlukan perhatian khusus karena ternyata di sepanjang tahun 2021, Kominfo telah melakukan penindakan dengan memblokir sebanyak 565.449 konten negatif dimana penyebaran tersebut menggunakan media sosial sebagai sarana yang paling sering dimanfaatkan.¹⁸ Sementara Laporan "2019 *CIGI-Ipsos Global Survey on Internet and Security Trust*" menyatakan media penyebaran hoaks sebagian besar menggunakan facebook dan medsos dan hal ini menjadi perhatian khusus pengguna jejaring internet di dunia,¹⁹ karena jumlah pengguna jejaring internet sudah mencapai 4,5 milyar orang atau lebih dari 60 persen penduduk dunia. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak strategis bagi keberlangsungan kehidupan bernegara.

d) Kejahatan Transnasional.

Sebagai wilayah strategis, wilayah Kalimantan Timur menjadi rawan karena dianggap sebagai jalur kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba dan penyelundupan orang. Selain itu daerah IKN juga berdekatan dengan *terrorist transit triangle*, yakni Sulu, Sabah, dan Poso. Melihat kondisi ini maka perlu diantisipasi dengan

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/masyarakat-paling-banyak-mengakses-informasi-dari-media-sosial>, diakses 1 April 2023 pukul 23.31 WIB.

¹⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 1 April 2023 pukul 20.31 WIB.

¹⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/survei-cigi-facebook-medsos-yang-banyak-digunakan-untuk-menyebar-hoaks> diakses 1 April 2023 pukul 12.40 WIB

mewujudkan sistem pertahanan yang kuat agar tidak menimbulkan instabilitas.

e) Bencana Alam.

Walaupun dinilai sebagai daerah yang minim bencana, namun mitigasi menjadi sesuatu yang perlu tetap dilakukan mengingat potensi kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya masih mungkin terjadi di wilayah tersebut. Sebagai bentuk keseriusan menjaga wilayah IKN dari bencana diterbitkan Perpres No. 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN Nusantara Tahun 2022-2042 dimana didalam mitigasi tersebut memerhatikan tiga aspek yaitu menjamin kualitas, menjaga kelestarian lingkungan, dan estetika.

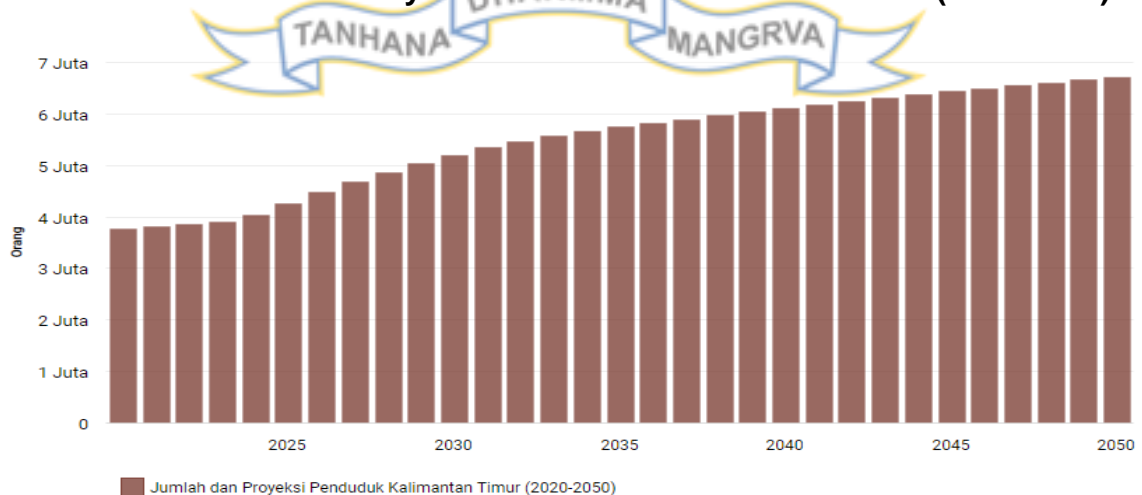
d. Potensi Demografi untuk Pertahanan di Kalimantan Timur

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghimpun data penduduk Kalimantan Timur melalui Sensus Penduduk (SP) 2020. Data ini menjadi dasar bagi proyeksi perkembangan penduduk hingga tahun 2050. Dalam esai ini, kami akan mengeksplorasi potensi demografi penduduk Kalimantan Timur dalam mendukung sistem pertahanan di wilayah ini. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,75 juta orang. Dalam waktu singkat, jumlah penduduk meningkat menjadi 3,8 juta orang pada tahun berikutnya. Proyeksi BPS memperkirakan penambahan sekitar 50 ribu penduduk pada tahun 2022, sehingga total jumlah penduduk mencapai 3,85 juta orang.²⁰ Dalam konteks pertahanan, pertumbuhan penduduk dapat memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, dengan peningkatan jumlah penduduk, Kalimantan Timur dapat memperkuat potensi sumber daya manusia yang tersedia untuk sistem pertahanan. Lebih banyak individu yang dapat direkrut dan dilibatkan dalam kegiatan pertahanan akan meningkatkan kekuatan dan daya tanggap wilayah tersebut terhadap ancaman eksternal.

²⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/asn-pusat-bakal-dipindahkan-bertahap-ke-ikn-bagaimana-proyeksi-penduduk-di-kalimantan-timur>, diakses pada 14 Juni 2023.

Selanjutnya, tahap pertama pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur lainnya ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, yang direncanakan pada tahun 2024, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sistem pertahanan. Proyeksi menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi sekitar 4,04 juta orang pada tahun tersebut. Hal ini akan membawa potensi peningkatan kekuatan pertahanan melalui ketersediaan lebih banyak tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih di wilayah ini. Selain itu, pola proyeksi menunjukkan penambahan penduduk yang stabil, dengan perkiraan peningkatan sekitar 200 ribu penduduk per tahun pada awal pemindahan IKN. Hal ini memberikan peluang bagi Kalimantan Timur untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur pertahanan yang lebih baik, termasuk fasilitas militer, pusat pelatihan, dan sistem komunikasi yang lebih canggih. Namun, proyeksi juga menunjukkan bahwa penambahan penduduk setelah tahun 2031 diperkirakan akan berkisar antara 50 hingga 100 ribu penduduk per tahun. Dalam jangka panjang, proyeksi BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan mencapai 6,7 juta orang.²¹ Jumlah ini menandakan pertumbuhan yang signifikan dan memberikan tantangan serta peluang baru dalam konteks pertahanan. Berikut uraiannya dalam gambar dibawah ini:

Gambar 6. Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur (2020-2050)



Sumber: BPS, 2023

²¹ *Ibid.*

10. Kerangka Teoretis.

a. Tinjauan Teori

1) Pertahanan Negara

Pertahanan dimaknai sebagai kebutuhan esensial atas kelangsungan kehidupan dari rasa aman atas berbagai ancaman.²² Untuk itu bagi setiap negara akan berusaha membangun sebuah sistem pertahanan yang baik karena sangat menentukan kedaulatan suatu negara. Sebagai sebuah teori, pertahanan memiliki sifat multidisipliner sehingga hal ini perlu dipahami dengan baik sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya rasa aman bagi seluruh masyarakat. Pada konteks tersebut, teori pertahanan dibutuhkan untuk dapat mewujudkan sebuah sistem pertahanan yang kuat di dalam menghadapi kompleksitas ancaman terutama di wilayah IKN yang merupakan ibukota negara.

2) Ancaman

Mengacu pada UU RI No. 34 Tahun 2004, Bab I Pasal 1 ayat 22 tentang TNI, ancaman merupakan upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman setidaknya dapat dipahami menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu ancaman militer dan non-militer.²³ Ancaman militer merupakan ancaman yang berkaitan dengan kemampuan militer, biasanya pelakunya negara lain yang ingin menginvasi, berperang, atau menguasai suatu wilayah dan negara tertentu. Ancaman tersebut biasa didefinisikan sebagai ancaman tradisional, karena ditemukan dalam kondisi perang dengan menggunakan kekuatan militer. Sementara, ancaman non militer didefinisikan sebagai ancaman yang menggunakan berbagai dimensi selain militer, termasuk ideologi, ekonomi, teknologi dan informasi,

²² Syarifudin Tippe. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2016).

²³ Craig A. Snyder. *Contemporary Security and Strategy*. (Abingdon: Routledge, 1999).

politik, dan juga sosial budaya, yang menyulitkan adalah menentukan aktor yang melakukan karena biasanya aktor non negara dan juga kelompok yang merupakan masyarakat sipil, sehingga lebih membahayakan kedaulatan dan keutuhan serta keselamatan bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkembangan dunia yang sangat dinamis seperti saat ini juga mempengaruhi ancaman yang terus berkembang. Kondisi ini menjadi peringatan keras dan juga perhatian bagi setiap negara agar dapat membangun sistem pertahanan negara yang ideal pada segala aspek, baik darat, laut ataupun udara sehingga mampu menghadapi setiap ancaman yang ada. Pada konteks ini ancaman perlu dipahami secara baik karena dapat mengganggu stabilitas terlebih di wilayah IKN yang merupakan daerah strategis atau pusat pemerintahan.

3) Hubungan Sipil-Militer

Hubungan sipil-militer tercipta dari transisi demokrasi yang menuntut agar dilakukan *recivilianization* dengan model penguatan masyarakat sipil agar berkuasa dan mulai dikurangnya peran militer di Indonesia. Keinginan agar peran politik militer dikurangi bahkan dihapuskan sebagai akibat dari (1) Kegagalan transisi menuju demokrasi dari pemerintahan militer; (2) Militer kehilangan legitimasi (kepercayaan rakyat) untuk memerintah; dan (3) Tuntutan atas demokratisasi dan supremasi sipil.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, teori hubungan sipil-militer digunakan untuk menjelaskan interaksi antara TNI dalam membangun sistem pertahanan yang melibatkan berbagai pihak khususnya masyarakat. Oleh karena itu maka hubungan sipil-militer perlu dibangun dengan sebaik-baiknya agar stabilitas nasional dapat diwujudkan.

²⁴ Mukhtar. Militer dan Demokrasi. (Malang: Intrans Publishing, 2017).

b. Tinjauan Konsep

1) Ketahanan Nasional

Secara umum istilah Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik bangsa yang berisi ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka mengatasi dan menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.²⁵ Sebagai sebuah sistem, ketahanan nasional Indonesia mempunyai beragam karakteristik gatra yang saling terkoneksi dan berinteraksi satu sama lain. Sesuai dengan bentuk dari NKRI, setiap wilayah memiliki kandungan aspek trigatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra statis. Terdapat pula Pancagatra yang menjadi pilar ketahanan nasional RI yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Setiap gatra tersebut akan bersifat dinamis dan memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda tergantung dari pembinaannya. Namun yang perlu dipahami bahwa ketangguhan gatra tersebut akan mendukung perwujudan tujuan negara dan cita-cita nasional utamanya di dalam mendukung pembangunan IKN.

2) Sistem Manajemen Nasional

Sistem manajemen nasional (Sismennas) merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional melalui paduan tata nilai, struktur, proses, dan fungsi yang merupakan himpunan usaha dalam rangka mencapai aspek ekonomis (kehematan), efisien (daya guna), dan efektif (hasil guna) sebesar mungkin dengan cara memanfaatkan segala sumber daya dan dana nasional.²⁶ Keseluruhan proses tersebut perlu melibatkan pengambilan keputusan dan kewenangan terutama di dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan IKN.

²⁵ *Loc., Cit.*, Lemhanas RI.

²⁶ Lemhannas RI. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. (Jakarta: Lemhannas, 2023).

3) Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional (Padnas) merupakan sikap yang berhubungan erat dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Sementara kewaspadaan nasional dalam konteks pemerintah dan elemen pertahanan berada dalam cakupan deteksi dini dan antisipasi terhadap ancaman negara.²⁷ Konsep kewaspadaan nasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan antisipasi dan deteksi dini atas kompleksitas ancaman yang dapat mengganggu pembangunan IKN.

4) Strategi Pertahanan Berlapis

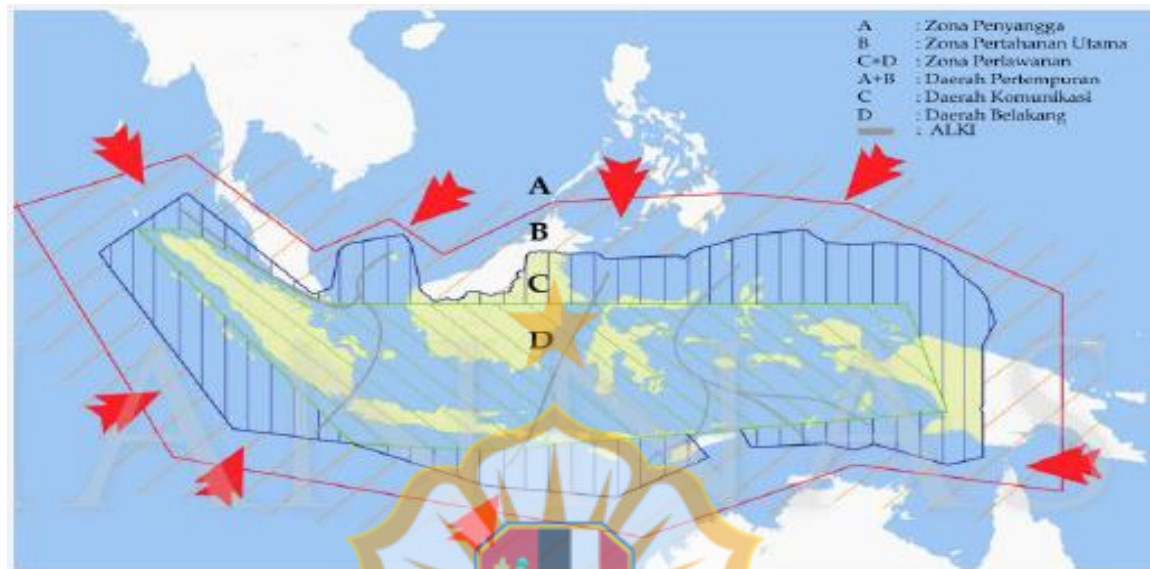
Konsep pertahanan nasional yang melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat, seperti masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Setiap elemen dan unsur tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing dalam memastikan keamanan dan stabilitas nasional.²⁸ Dalam konsep ini dilakukan secara terpadu, *deterrence*, defensif aktif dan strategi pertahanan berlapis yang terbagi atas beberapa zona. Terkat dengan hal tersebut, maka pembagian zona dapat terlihat dalam gambar 2.1 yang secara garis besar dijelaskan sebagai berikut: Zona Penyangga, yaitu daerah benteng pertahanan berfungsi sebagai wilayah untuk mencegah konflik antara dua pihak yang berseteru. Zona Pertahanan Udara, wilayah teritorial yang merupakan daerah pertahanan udara suatu negara. Zona Perlawanan dalam Militer, markas atau instalasi militer yang ditetapkan sebagai zona pertahanan yang ketat. Daerah Pertempuran, yaitu tempat terjadinya pertempuran atau konflik bersenjata. Daerah Komunikasi, merupakan daerah yang dimanfaatkan sebagai infrastruktur yang

²⁷ Lemhannas RI. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. (Jakarta: Lemhannas, 2023).

²⁸ Setiawan, W.B.M., Mantri, B.H. dan A. Junaidi. Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia yang Berdaulat. *Borneo Law Review*, Vol. 4, No.2 (2020).

diperlukan di dalam operasi militer. Daerah Belakang, yaitu wilayah suatu negara yang berada di belakang garis depan atau zona pertempuran.

Gambar 7. Strategi Pertahanan Berlapis



Sumber: Kemhan (2022)

11. Lingkungan Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional ataupun internasional selalu mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan pembangunan IKN baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak dominan yang menuntut suatu tata kelola yang baik sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada bagian ini diuraikan secara singkat kondisi perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan:

a. Global

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global telah menimbulkan ancaman dan tantangan baru bagi setiap negara yang tidak hanya bersifat tradisional (militer) namun juga non-militer. Pola ancaman dan tantangan tersebut berubah cukup pesat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Dunia memasuki Era Industri 4.0 dan bahkan 5.0 yang

mengakibatkan percepatan modernisasi, khususnya di negara maju, sehingga menimbulkan masalah keamanan (*security dilemma*) yang mewajibkan setiap negara yang belum mampu harus mengimbangi kemajuan tersebut melalui penyesuaian strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanannya. Perubahan pola ancaman tersebut merupakan tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia baik militer maupun non-militer, meliputi: terorisme dan radikalisme global, kemungkinan perang nuklir, kejahatan siber (dunia maya), bencana alam yang diakibatkan perubahan iklim, perang dagang AS dan Tiongkok yang mempengaruhi ekonomi negara-negara lain, ketegangan di Timur Tengah, Perang Rusia Ukraina, Konflik Cina dan Taiwan, Ambisi Cina di Laut Cina Selatan, Peran AS dalam lingkungan global yang cukup memberikan pengaruh strategis atas stabilitas negara-negara lain karena dinilai memiliki kekuatan dalam bidang politik, ekonomi serta pertahanan. Kemudian beberapa isu terkini seperti penyebaran wabah virus Covid-19 yang beberapa waktu lalu memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia. Selain itu, interaksi negara-negara *great powers*, seperti Korea Utara, Amerika Serikat, dan Tiongkok juga telah mempengaruhi konstelasi Kawasan Asia Pasifik yang memberikan dampak langsung terhadap politik internasional Indonesia, terlebih Indonesia saat ini sedang membangun IKN.

Selain itu perang Rusia-Ukraina juga perlu dipahami dengan baik karena mempengaruhi konstelasi global. Setidaknya beberapa dampak yang dirasakan akibat perang tersebut, diantaranya: komoditas melambung terutama minyak dan gas mengingat Rusia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir bahan bakar fosil terbesar di dunia. Perang tersebut juga adanya potensi krisis pangan global karena sebagaimana diketahui dua negara tersebut penyumbang 30 persen gandum skala global. Akibat dari kondisi tersebut tentu sangat mengancam pemulihan ekonomi terutama pasca pandemi Covid-19.²⁹

Perkembangan global yang terjadi secara tidak langsung tentu sangat mempengaruhi stabilitas sehingga kondisi tersebut perlu dipahami dengan

²⁹ <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/23/210000170/5-dampak-perang-rusia-ukraina-yang-mengubrak-abrik-ekonomi-global?page=all>, diakses 12 April 2023 pukul 06.30 WIB.

baik agar tidak mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung. Adapun beberapa isu global lainnya seperti senjata pemusnah massal, pemanasan global, HAM, pengungsi dunia dan lain sebagainya perlu dipahami dengan baik karena secara tidak langsung turut mempengaruhi stabilitas terutama di wilayah IKN yang nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan.

b. Regional

Pada lingkup regional yang menarik terlihat dari, perkembangan Laut China Selatan dimana cukup mempengaruhi konstelasi geopolitik dan geostrategi khususnya lingkup regional, serta kerjasama yang terjalin antara Jepang dan Australia dalam melawan China di Asia Pasifik. Perihal kerjasama kedua negara tersebut dilakukan dengan meningkatkan anggaran agar semakin memperkuat aspek pertahanannya. Diketahui Australia mengalokasikan dana hingga US\$ 186 miliar atau meningkat 40 persen dari sebelumnya untuk memperkuat pertahanannya termasuk dengan menambah persenjataan kapal selam nuklir.³⁰ Sedangkan Jepang menggelontorkan dana USD 865 miliar atau meningkat 26,3 persen dari tahun sebelumnya.³¹ Penambahan anggaran tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintahan Jepang di dalam pengembangan alutsista yang ada sehingga pada akhirnya mampu memperkuat sistem pertahanannya. Kondisi ini tentu mempengaruhi lingkup regional khususnya dalam lingkup pertahanan dan keamanan wilayah.

Kemudian perkembangan yang terjadi saat ini salah satunya juga ditandai dengan era digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pertahanan. Akibatnya beberapa negara memandang bahwa perang tidak hanya dapat dilihat dari bentuknya yang terbatas menggunakan senjata namun juga berekspansi pada berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sosial-politik, budaya, ekonomi serta lain sebagainya. Dengan kata lain

³⁰ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200701231153-113-519804/australia-naikkan-anggaran-pertahanan-jadi-us-186-miliar>, diakses 4 April 2021 WIB.

³¹ [https://www.aa.com.tr/id/dunia/china-khawatir-dengan-anggaran-pertahanan-terbaru-jepang/2773803#:~:text=Rancangan%20anggaran%20untuk%20tahun%202023,triliun%20yen%20\(USD865%20miliar\)](https://www.aa.com.tr/id/dunia/china-khawatir-dengan-anggaran-pertahanan-terbaru-jepang/2773803#:~:text=Rancangan%20anggaran%20untuk%20tahun%202023,triliun%20yen%20(USD865%20miliar)), diakses 4 April 2023 pukul 21.30 WIB.

peperangan dan konflik yang terjadi di suatu negara tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer, tetapi kekuatan nirmiliter yang turut dilakukan oleh aktor non-negara (*non state actor*). Tak terkecuali dalam lingkup regional seperti peredaran narkoba, *illegal logging* hingga sengketa wilayah negara. Dalam lingkup regional telah terjadi peredaran narkoba, *illegal logging* hingga sengketa wilayah negara, hal ini tentu mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang berada wilayah Asia dan juga ASEAN, yang pada akhirnya mempengaruhi politik dalam negeri. Selain itu baru-baru ini, China mengumumkan pada bulan April 2023 akan melaksanakan latihan militer di Selat Taiwan.³² Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi stabilitas kawasan sehingga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan gejolak. Disamping itu melihat kondisi yang demikian maka diperlukan penanganan komprehensif yang tidak hanya konsen membangun pertahanan secara militer namun juga dapat dibangun dan dikembangkan pertahanan pada cakupan non militer.

c. Nasional

Dalam kondisi internal atau dalam lingkungan nasional Indonesia, faktor lingkungan strategis dibahas melalui pendekatan astagatra. Namun secara spesifik lebih difokuskan pada aspek yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Geografi

Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografi strategis karena terletak diantara dua benua dan dua samudera pada dasarnya memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam kemajuan bangsa. Namun tidak hanya keuntungan yang didapat tetapi juga rentan atas permasalahan yang terjadi. Kasus persengketaan wilayah dengan negara-negara lain, seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, Blok Ambalat, Perairan Natuna dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di perairan Natuna merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, sedangkan Tiongkok semakin

³² <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230408083744-113-935022/siaga-tempur-china-gelar-latihan-militer-di-selat-taiwan>, diakses 8 April 2023 pukul 08.23 WIB.

menunjukkan sikap kurang baik dengan melakukan pelanggaran ZEE atas wilayah perairan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang sedemikian rupa memerlukan penanganan terukur agar kedaulatan wilayah tetap terjaga.

2) Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa seharusnya membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Namun demikian hingga saat ini persebaran penduduk yang mencapai 18% dari total jumlah penduduk Indonesia ternyata masih terkonsentrasi di pulau Jawa.³³ Hal ini berdampak pada ketimpangan di setiap wilayah di Indonesia yang ditandai dengan kesenjangan sosial-ekonomi, tidak meratanya pembangunan, peningkatan jumlah pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain sebagainya. Dalam pembangunan IKN tentu hal ini perlu menjadi perhatian serius agar ketimpangan yang terjadi dapat segera diselesaikan. Terlebih Kalimantan Timur memiliki populasi yang heterogen dengan beragam suku, agama, dan bahasa. Suku-suku yang terdapat di Kalimantan Timur antara lain Dayak, Banjar, Kutai, Jawa, dan Madura. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur adalah muslim, namun terdapat juga beberapa agama minoritas seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Untuk itu perihal kondisi demografi perlu dilihat secara baik agar mampu membangun sistem pertahanan IKN yang tangguh.

3) Sumber Kekayaan Alam

Indonesia sebagai negara yang memiliki SKA berlimpah, sudah selayaknya Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri. Namun sampai saat ini Indonesia masih dilanda krisis kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai bahkan garam. Berbagai laporan menyatakan pertumbuhan rata-rata impor Indonesia mencapai 22%, sementara ekspor hanya tumbuh antara 7-8%. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri

³³ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/penduduk-indonesia-masih-terkonsentrasi-di-pulau-jawa> diakses pada 2 April 2023 pukul 12.30 WIB.

yang masih bergantung kepada impor.³⁴ Disamping itu juga eksploitasi SDA yang tidak terkendali berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga mengganggu ekosistem yang seharusnya mampu hidup berdampingan.

4) Ideologi

Ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia pada hakikatnya mampu menjadi landasan dalam membangun keutuhan bangsa. Namun dalam perkembangannya terdapat kecenderungan mudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan tidak terimplementasikannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia yang disebabkan kurang baiknya dalam memahami nilai-nilai ideologi bernegara yang baik. Oleh karena itu, pemahaman ideologi Pancasila yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat sehingga perlu dibangun secara optimal.

5) Politik

Sistem politik demokratis yang diterapkan Indonesia merupakan bentuk kemajuan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sipil khususnya dapat berperan atau berkontribusi dalam memajukan negara. Namun demikian belakangan sistem politik tersebut berdampak pada hubungan sipil-militer, dimana keterlibatan militer dalam menjaga keamanan dalam negeri dengan dasar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) masih menjadi polemik. Keterlibatan militer seringkali sangat dibutuhkan namun banyak pihak yang menentang karena dinilai melanggar dan bertentangan dengan supremasi sipil. Kondisi ini masih menjadi perdebatan politik, sehingga memunculkan pro-kontra politik dalam membangun hubungan tersebut. Disamping itu kondisi politik menjelang Pilpres dan Pilkada serentak 2024 juga turut mempengaruhi tatanan kehidupan demokrasi. Terlebih pada masa tersebut penggunaan politik identitas masih kerap ditemui sehingga dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.

³⁴ *Ibid.*

6) Ekonomi

Kontribusi ekonomi pulau Jawa mencapai 59,0% terhadap PDB nasional. Bandingkan dengan wilayah lainnya seperti Maluku dan Papua yang hanya menyumbang 2,41%. Padahal jika diperhatikan kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap PDB nasional.³⁵ Ketimpangan tersebut perlu dipahami dengan baik khususnya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan utamanya dalam pembangunan IKN yang berkelanjutan.

7) Sosial Budaya

Upaya mengoptimalkan budaya kolektif masyarakat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan budaya gotong royong masyarakat masih perlu ditingkatkan, karena dalam membangun IKN tentu perlu melibatkan semua elemen masyarakat agar pembangunan ibukota negara dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sikap kolektif ini penting untuk menghindari terjadinya sikap konfrontatif dan antagonis, serta menciptakan sifat konsultatif, dan kerjasama hingga menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Dalam konteks tersebut diketahui budaya masyarakat lokal yang cenderung hidup damai dan toleran dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Namun, adanya isu-isu sosial yang sensitif seperti isu keagamaan, etnis, dan identitas budaya dapat memicu ketegangan dan konflik sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan wilayah. Selain itu isu pemindahan masyarakat Jakarta ke Kalimantan juga berpotensi menjadi ancaman potensi konflik mengingat adanya perbedaan budaya yang cukup signifikan antara Jakarta dan Kalimantan Timur. Belum lagi adanya pendatang yang berpotensi mempengaruhi siklus ekonomi masyarakat setempat. Maka dari itu, potensi konflik yang bernuansa SARA akibat dari pemindahan penduduk secara masif ini juga perlu mendapat perhatian serius; dan

³⁵ <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/610b9dc3601f5/pertumbuhan-ekonomi-papua-maluku-tertinggi-capai-8-75-pada-kuartal-2>, diakses 1 April 2023 pukul 11.00 WIB.

8) Pertahanan dan Keamanan

Sesuai dengan fokus bahasan Taskap, yaitu Sistem Pertahanan dalam menghadapi ancaman di Wilayah IKN, maka setiap ancaman pertahanan dan keamanan merupakan faktor lingkungan strategis yang paling berpengaruh, baik bersifat militer maupun non militer. Kondisi ini perlu dipahami dengan baik karena membawa dampak luas terhadap kedaulatan negara dan stabilitas nasional.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Dalam pembangunan IKN, salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni berkenaan dengan unsur pertahanan. Pertahanan dipandang memiliki peran strategis karena terkait dengan unsur-unsur kehidupan lainnya sehingga sudah sepatutnya mampu dikelola dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia mengusung sistem pertahanan yang bersifat semesta dimana seluruh komponen bangsa turut terlibat di dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara dari kompleksitas ancaman yang terus berkembang. Untuk itu pendekatan yang perlu diterapkan lebih menitikberatkan dan berorientasi pada lingkup multidimensional sehingga mampu terbangun sistem pertahanan yang sesuai. Perihal penjelasan tersebut, bagian ini menjelaskan beberapa hal yaitu: ancaman di wilayah IKN, sistem pertahanan di wilayah IKN dalam menghadapi ancaman saat ini dan upaya mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN.

13. Ancaman di wilayah IKN.

Upaya pemerintah didalam melakukan pemindahan ibu kota dari sebelumnya berada di Jakarta kemudian dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Kebijakan strategis yang diambil pemerintah tersebut merupakan upaya di dalam mewujudkan pembangunan nasional. Perihal upaya strategis yang dilakukan, pemerintah telah merencanakan pemindahan Ibu Kota negara melalui empat tahap yang dijelaskan dalam Buku Saku Pemindahan IKN. Tahapan pertama dimulai pada 2020-2024, di mana fokus utamanya adalah pada pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan dan gedung MPR/DPR, serta perumahan di area utama IKN.

Selanjutnya, tahap kedua pada 2025-2035 akan fokus pada pembangunan area inti IKN dan pengembangan fase kota berikutnya, termasuk pusat inovasi dan ekonomi, pemindahan pusat pemerintahan, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, dan sistem insentif untuk mencapai *Sustainable Development*

Goals (SDG's). Tahap ketiga pada 2035-2045 akan memfokuskan pada membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk mempercepat pembangunan di Kaltim. Tahap terakhir akan dilaksanakan pada periode 2045. Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat memastikan pemindahan ibu kota berjalan lancar dan membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Akibat kebijakan tersebut tentu berimplikasi pada *Center of Gravity* (CoG) sehingga turut mempengaruhi strategi pertahanan negara yang sesuai untuk diterapkan. Beberapa alasan pentingnya membangun aspek pertahanan dalam pembangunan IKN, yaitu:

- a. IKN merupakan wilayah yang dijadikan berbagai aktivitas seperti: pusat pemerintahan, keuangan, simbol atau identitas negara serta lain sebagainya sehingga sudah selayaknya pertahanan dibangun dengan baik dalam mendukung terwujudnya stabilitas.
- b. Sebagai objek vital negara, maka IKN perlu didukung dengan kesiapan sistem pertahanan baik yang bersifat militer maupun non militer. Dari konteks militer maka dapat memperkuat komponen utama sedangkan dari sisi non militer dapat mengoptimalkan sumber daya lain seperti komponen cadangan dan pendukung.
- c. Kompleksitas ancaman yang tidak hanya terbatas dalam bentuk fisik namun juga non fisik. Ancaman dalam bentuk fisik (militer) dapat berupa perang terbuka yang menggunakan persenjataan atau alutsista sedangkan ancaman non-fisik (non militer) dapat digambarkan seperti ideologi, siber, propaganda dan lain sebagainya. Kesemua ancaman tersebut di dalam pembangunan IKN perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak sistemik bagi keberlangsungan negara.

Perihal ancaman secara teoritis dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat membahayakan sehingga perlu diwaspadai agar tidak mengganggu stabilitas.³⁶ Terkait dengan ancaman yang ada di wilayah IKN, mengacu Rencana Pembangunan Satuan TNI di IKN tahun 2022 terbagi atas ancaman militer, non militer dan hibrida. Namun demikian sebagaimana telah disinggung sebelumnya

³⁶ *Ibid.*

penjelasan perihal ancaman difokuskan pada lingkup ancaman militer dan non militer. Beberapa ancaman di wilayah IKN dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ancaman Militer:

- 1) Invasi. Perubahan dinamika politik di wilayah Asia Tenggara atau di sekitar Indonesia dapat mempengaruhi kestabilan regional dan memunculkan ketegangan yang meningkat. Ketegangan tersebut bisa menjadi pemicu bagi potensi ancaman invasi.
- 2) Ancaman terhadap kedaulatan wilayah udara. Serangan udara yang dilakukan oleh negara asing atau kelompok teroris dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan udara. Serangan udara dapat mencakup serangan pesawat tempur, rudal, atau serangan udara tak berawak.
- 3) Serangan dari pasukan militer negara lain. Masalah perbatasan dengan negara tetangga atau klaim teritorial yang saling bertentangan dapat menjadi sumber ketegangan dan meningkatkan risiko ancaman serangan militer di wilayah IKN. Hal ini tentu dipengaruhi terkait dinamika politik, konflik, atau kepentingan strategis di tingkat regional atau global dapat mempengaruhi keamanan dan menyebabkan ancaman serangan militer terhadap wilayah ibu kota Nusantara.
- 4) Keberadaan elemen kekuatan militer asing di wilayah NKRI. Keberadaan elemen kekuatan militer asing di wilayah ibu kota Nusantara memang sampai saat ini tidak ada. Namun perlu diantisipasi mengingat dalam konteks geopolitik, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan adanya ancaman serangan dari pasukan militer negara lain di masa depan. Potensi ancaman dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketegangan regional, konflik perbatasan, klaim teritorial, atau kepentingan strategis di tingkat regional atau global.
- 5) Konflik perbatasan. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Konflik perbatasan yang eskalatif dapat menyebabkan ancaman militer terhadap wilayah IKN.

6) Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah dengan negara tetangga atau klaim teritorial yang saling bertentangan dapat menjadi sumber ketegangan dan meningkatkan resiko ancaman invasi di wilayah terkait. Kondisi ini perlu dipahami karena Indonesia berdekatan dengan kawasan kekuatan militer negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Vietnam, China, dan US Indopacom.

7) Sabotase. Secara umum ancaman sabotase di wilayah ibu kota Nusantara dapat menjadi masalah keamanan yang serius. Sabotase dapat merujuk pada beberapa tindakan, diantaranya: kelompok teroris dapat melakukan serangan sabotase di wilayah perkotaan, seperti meledakkan bangunan, fasilitas transportasi, atau infrastruktur kritis lainnya; Serangan siber yang ditujukan untuk merusak atau menghancurkan sistem komputer dan jaringan informasi dapat mengganggu berbagai sektor, termasuk infrastruktur, transportasi, keuangan, atau komunikasi di wilayah ibu kota; Upaya untuk merusak atau menghentikan operasional industri kunci, seperti pembangkit listrik, sumber air, atau fasilitas produksi lainnya, dapat menyebabkan gangguan serius bagi kehidupan sehari-hari dan ekonomi di ibu kota; dan Kelompok atau individu dengan motif politik atau ideologis ekstremis dapat melakukan tindakan sabotase untuk menyebabkan ketidakstabilan, kepanikan, atau merusak citra negara di wilayah ibu kota.

8) Spionase. Salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai khususnya di era modern saat ini, yaitu penggunaan pesawat atau drone asing tanpa izin atau invasi udara yang tidak sah dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan udara. Hal ini dapat terjadi karena ketegangan regional, klaim wilayah yang saling bertentangan, atau kegiatan intelijen yang mencurigakan.

9) Separatisme. Beberapa wilayah di Indonesia telah menghadapi gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Pemberontakan separatis ini dapat mengarah pada ancaman militer terhadap wilayah Ibu Kota Nusantara.

b. Ancaman Non Militer:

1) Aksi terorisme. Indonesia telah menghadapi ancaman terorisme dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi teroris dapat mengincar wilayah ibu kota Nusantara sebagai target serangan untuk menciptakan kekacauan dan merusak stabilitas.

2) Keamanan bagi pejabat VIP. Pejabat VIP sering menjadi target potensial bagi kelompok-kelompok tertentu yang terorganisir, seperti pemerasan, penculikan, atau serangan bersenjata, dapat mengancam keamanan pejabat VIP. Situasi ini dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal dengan motif finansial atau politik. Untuk itu kemungkinan ancaman ini perlu dipahami dan diwaspadai dengan sebaik-baiknya.

3) Bencana banjir. Kalimantan Timur secara umum dapat menghadapi ancaman banjir seperti wilayah lain di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ancaman banjir di Kalimantan Timur diantaranya: Curah hujan yang tinggi, terutama selama musim hujan, dapat menyebabkan peningkatan volume air di sungai-sungai dan saluran drainase, yang dapat menyebabkan banjir; Beberapa daerah di Kalimantan Timur memiliki topografi yang datar atau berada di dataran rendah, yang meningkatkan resiko banjir akibat sulitnya aliran air yang efisien; dan Pembalakan hutan yang tidak terkendali atau kerusakan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi siklus hidrologi alami dan mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyerap air hujan, yang dapat meningkatkan risiko banjir.

4) Kebakaran hutan dan lahan. Ancaman ini pada dasarnya perlu dipahami dengan baik karena dapat saja menimpa wilayah IKN. Beberapa penyebabnya diantaranya: Musim kemarau yang panjang dan cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Curah hujan yang rendah dan kelembaban udara yang rendah membuat vegetasi lebih rentan terhadap kebakaran; Pembakaran lahan yang tidak terkendali, terutama untuk tujuan perkebunan, pertanian, atau pembukaan lahan baru, dapat dengan cepat menjalar dan

menyebabkan kebakaran hutan yang meluas; Pembalakan hutan yang tidak berkelanjutan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Penebangan pohon secara ilegal atau tanpa pengelolaan yang tepat dapat meninggalkan sisa-sisa kayu kering yang rentan terhadap api; dan Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas kebakaran hutan. Peningkatan suhu, angin kencang, dan kekeringan yang parah dapat memperburuk risiko kebakaran.

5) Kecelakaan di laut atau udara. Sebagai wilayah yang memiliki akses laut dan udara yang penting, ada beberapa ancaman umum yang perlu diperhatikan, diantaranya: Kecelakaan kapal seperti tabrakan, tenggelam, atau kebakaran dapat terjadi di perairan Kalimantan Timur. Faktor-faktor seperti navigasi yang buruk, cuaca buruk, kelalaian, atau kegagalan sistem dapat menyebabkan kecelakaan kapal; dan Bencana alam seperti badai tropis atau gempa bumi dapat mempengaruhi wilayah pesisir dan meningkatkan risiko kecelakaan di laut, termasuk terombang-ambingnya kapal, kerusakan infrastruktur pelabuhan, atau gangguan komunikasi.

6) Konflik sosial. Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis, suku, dan agama yang besar. Ketegangan antarsuku atau antar agama tertentu dapat memicu konflik yang berpotensi melibatkan kekerasan dan ancaman militer di wilayah tertentu termasuk IKN.

7) Keamanan di perairan yurisdiksi nasional. Perairan yurisdiksi nasional di sekitar wilayah ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, seperti perairan lainnya di Indonesia, dapat menghadapi beberapa ancaman keamanan, diantaranya: Penyelundupan barang terlarang karena sebagaimana diketahui Kalimantan Timur merupakan wilayah strategis dan berbatasan dengan negara tetangga dapat menjadi jalur untuk penyelundupan narkoba, senjata, atau barang-barang terlarang lainnya. Upaya penyelundupan semacam itu dapat membahayakan keamanan nasional dan stabilitas wilayah; Kejahatan Laut dimana wilayah IKN merupakan perairan yang sibuk dan memiliki aktivitas pelayaran yang tinggi rentan terhadap kejahatan laut, termasuk

perampokan kapal, pencurian barang, atau penculikan awak kapal. Kelompok bersenjata atau perompak laut dapat menjadi ancaman bagi keamanan di perairan tersebut; Wilayah perairan Indonesia sering menjadi sasaran IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) fishing, di mana kapal nelayan ilegal dari negara lain masuk dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Praktik ini dapat merugikan ekonomi, lingkungan, dan keamanan pangan Indonesia; dan Sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga dapat menciptakan ketegangan dan meningkatkan resiko konflik di perairan yurisdiksi nasional. Perairan yang disputatif atau wilayah klaim *overlapping* dapat memicu ketegangan keamanan.

8) Keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional. Ancaman terhadap sistem pertahanan udara nasional, termasuk peretasan atau serangan siber terhadap sistem radar, sistem komunikasi, atau sistem pertahanan udara lainnya, dapat mengancam kedaulatan udara dengan mengurangi kemampuan untuk mendeteksi dan merespons ancaman udara.

9) Bencana bukan karena alam. Sebagai wilayah strategis, IKN perlu juga mengetahui beberapa ancaman bencana bukan alam, yaitu: Ancaman terorisme dapat menyebabkan kerugian besar terhadap kehidupan manusia dan kerusakan infrastruktur. Serangan teroris di ibu kota Nusantara dapat menargetkan fasilitas pemerintah, tempat umum, atau instalasi kunci; Konflik sosial, kerusuhan, atau bentrokan antar kelompok dapat terjadi di wilayah ibu kota Nusantara dan mengancam keamanan dan stabilitas; Ancaman serangan siber, termasuk serangan komputer, peretasan data, atau serangan siber terhadap infrastruktur teknologi informasi, dapat mengganggu operasional pemerintah, sektor keuangan, atau layanan penting lainnya di ibu kota Nusantara; dan Keberadaan industri atau fasilitas penting di ibu kota Nusantara dapat menghadirkan resiko kecelakaan industri, seperti kebocoran bahan kimia berbahaya, ledakan, atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur menjadi tantangan tersendiri apalagi ketika dihadapkan dalam kompleksitas ancaman yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan instabilitas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, wilayah Ibu Kota Nusantara (Kalimantan Timur) memiliki kompleksitas dan dinamikanya tersendiri, mulai dari geografis hingga persoalan sosial budaya yang cukup berbeda dengan ibu kota Indonesia yang sekarang (Jakarta). Oleh karena itu upaya membangun kekuatan pertahanan baik darat, laut maupun udara harus dikembangkan dalam konteks operasi multidomain. Kondisi ini perlu dipahami mengingat IKN belum terlibat dalam jejaring *Belt and Road Initiative* (BRI), yang memiliki pengaruh global terhadap kesejahteraan di masa depan sehingga kemungkinan rentan terhadap konflik di Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara besar.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka dapat diprediksi ancaman perang antar negara adidaya (*hegemonic war*) akan menjadi salah satu ancaman paling dominan bagi pertahanan IKN. Ancaman tersebut tidak berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, melainkan dari dampak konflik antara dua negara adidaya, seperti Amerika Serikat dan China. Wilayah lain di Indonesia kemungkinan tidak akan menjadi sasaran utama serangan, tetapi Indonesia akan menjadi titik yang dilintasi atau dilewati dalam memobilisasi serangan. Oleh karena itu, pentingnya membangun pertahanan Nusantara secara menyeluruh, bukan hanya membangun Ibu Kota Nusantara, namun juga memperhatikan pertarungan antara negara-negara pemegang hegemoni seperti Amerika Serikat dan China, yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu titik strategis yang harus dikuasai. Berdasarkan hal tersebut sebetulnya bahwa Indonesia masih memiliki waktu untuk menyusun strategi pertahanan, mempersiapkan pasukan dan alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista), serta mengadopsi teknologi dalam membangun pertahanan berlapis untuk menjaga wilayah NKRI, terutama Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks ini, peningkatan kesiapan komponen pertahanan di Kalimantan Timur perlu untuk dilibatkan dalam pertahanan semesta di IKN sehingga mampu menghadapi ancaman di wilayah tersebut.

14. Sistem pertahanan di wilayah IKN dalam menghadapi ancaman saat ini.

Secara umum pembangunan pertahanan pada dasarnya sejalan dengan RPJMN IV tahun 2020-2024 dimana upaya mewujudkan kemampuan pertahanan menjadi sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang kompleks.³⁷ Lebih lanjut dalam menghadapi ancaman yang semakin berkembang terutama di wilayah IKN berdasarkan pada Konsep Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KPN-KRI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KPN-KRI merupakan suatu konsep pertahanan yang mengintegrasikan aspek militer dan non-militer dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan sistem pertahanan semesta sebagaimana telah dijelaskan UU No. UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni melibatkan seluruh komponen bangsa dalam melindungi kedaulatan dan menghadapi kompleksitas ancaman.

Terkait dengan hal tersebut pada lingkup militer, sistem pertahanan di wilayah IKN didasarkan pada tiga pilar utama yaitu pertahanan darat, laut, dan udara atas gelar satuan yang ada. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. TNI AD. Saat ini gelar satuan TNI matra darat di wilayah IKN bentuk kompartemen strategis atau dalam suatu Komando Daerah Militer (Kodam) yang memiliki wilayah tanggung jawab yang telah ditentukan dan saat ini terdapat beberapa Kodam di jajaran TNI AD guna bertujuan di dalam mencegah, menangkal dan mengatasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan bangsa. Lebih lanjut gelar kekuatan TNI AD terdiri atas:

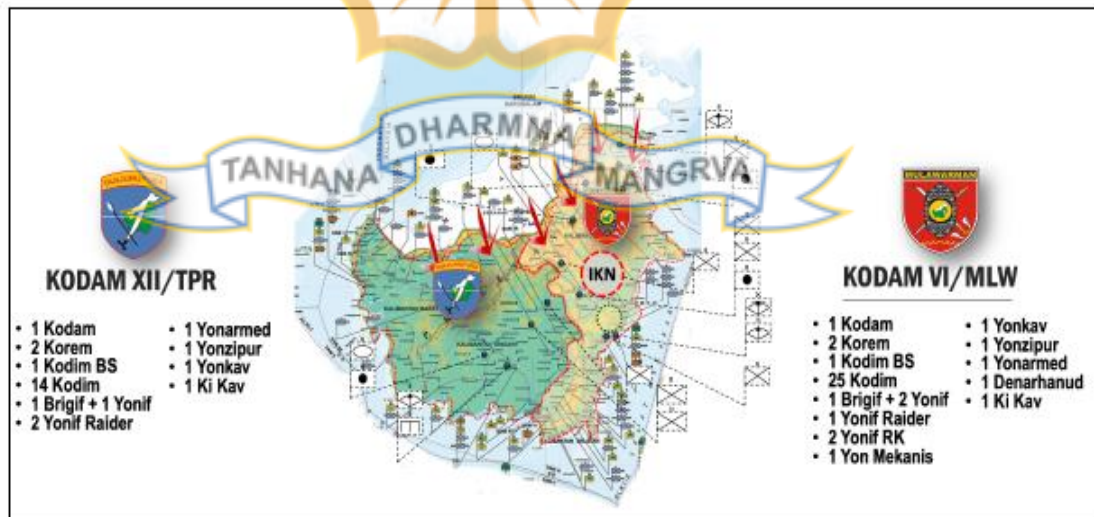
- 1) Kodam XII/Tpr yaitu: 2 Korem, 15 Kodim, Brigade Infanteri (Brigif) 19/Khatulistiwa di Singkawang (Yonif 645/Gardatama Yudha di Sangau), Yonif Raider 641/Beruang di Singkawang, Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti di Putussibau, Satuan Bantuan Tempur (1 Yon Armed 16/Komposit/Tumbak Kaputing di Ngabang, 1 Yon Zipur 6/Satya Digdaya di Anjungan, 1 Yonkav 12/Beruang Cakti di Peniti, dan 1 Kikav 12/Macan Dahan Cakti di Kubu Raya).

³⁷ Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Jakarta: Bappenas, h. 233-234.

2) Kodam VI/MLw, yang terdiri dari: 3 Korem, 25 Kodim, Brigade Infanteri (Brigif) 24/Bulungan Cakti, Yonif Raider 600/Modang di Balikpapan 3 Yonif (Yonif 611/Awang Long di Loa Janan, Yonif 621/Manuntung di Barabai, dan Yonif 623/Bhakti Wira Utama di Banjarbaru); dan 6 Satuan Bantuan Tempur (1 Yonkav 13/Satya Lembuswana di Samboja, 1 Yonzipur 17/Ananta Dharma di Samarinda, 1 Yonarmed 18/Buritkang di Berau, 1 Denzipur 8/Gawi Manuntung di Banjarbaru, 1 Denarhanud Rudal 002/Agni Bala Cakti di Bontang dan 1 Kikav 13/Macan Tutul di Samboja).

Terkait dengan hal tersebut, Kodam XII/Tpr dan Kodam VI/MLw sama-sama memiliki peran strategis di dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara terutama **matra** darat dimana hal tersebut dilakukan mengacu pada keputusan atau kebijakan Panglima TNI. Berdasarkan hal tersebut, maka gelar kekuatan TNI AD di wilayah IKN saat ini dapat tergambar sebagai berikut:

Gambar 8. Gelar Satuan TNI AD di Wilayah IKN Saat Ini

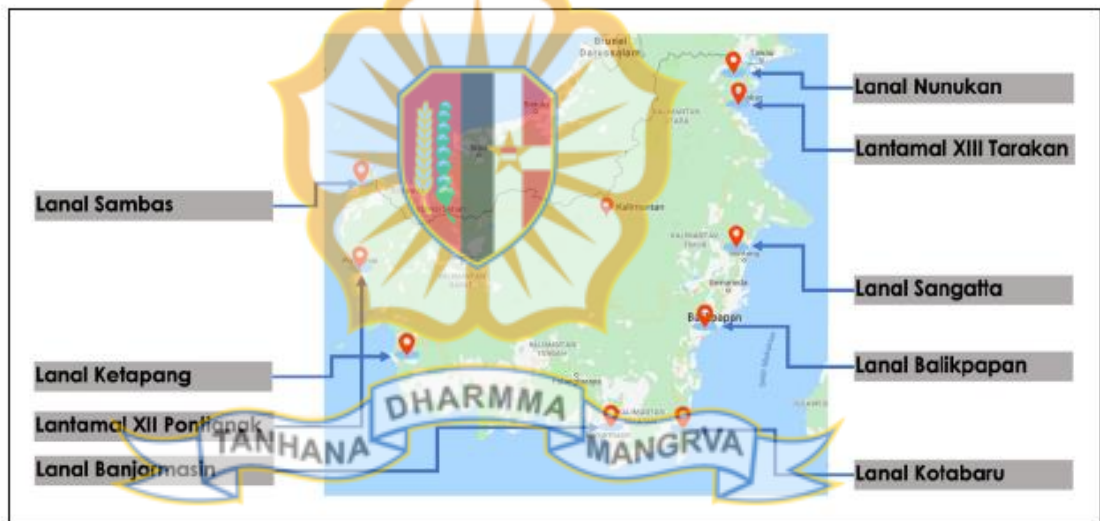


Sumber: Srenad (2022)

b. TNI AL. Gelar kekuatan TNI AL disusun dalam 3 Komando Armada (Koarmada) yang mengemban tugas melaksanakan operasi laut baik dalam

lingkup OMP maupun OMSP sebagaimana hal tersebut di dasarkan pada ketentuan yang telah diatur. Adapun Koarmada terdiri atas Gugus Tempur Laut (Guspurla) dan beberapa Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) dan beberapa satuan kapal. Perihal gelar kekuatan TNI AL terutama di wilayah IKN terdiri atas: Koarmada I yang membawahi Lantamal XII/Ptk, dengan satuan: Lanal Sambas dan Lanal Ketapang; serta Koarmada II yang membawahi Lantamal XIII/Trk, dengan satuan: Lanal Balikpapan, Lanal Sangatta, Lanal Nunukan, dan Lanal Banjarmasin. Peran strategis baik Lantamal XII/Ptk dan Lantamal XIII/Trk sama-sama memiliki andil besar di dalam menjaga kemanan laut terutama di wilayah IKN. Berkenaan dengan gelar satuan TNI AL dapat tergambar sebagai berikut:

Gambar 9. Gelar Satuan TNI AL di Wilayah IKN Saat Ini

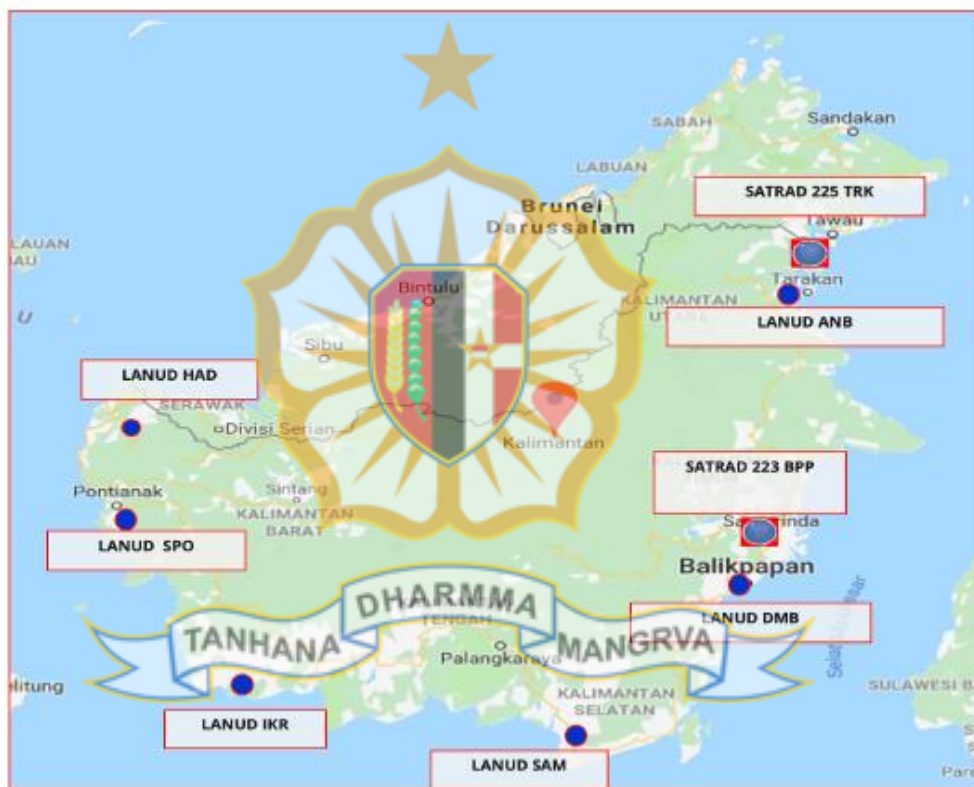


Sumber: Srenad (2022)

c. TNI AU. Secara umum gelar kekuatan TNI matra udara disusun dalam 3 Komando Operasi Udara (Koopsud) dimana terdapat Koopsud yang memiliki tugas melaksanakan berbagai operasi udara yang berdasarkan kebijakan Panglima TNI. Adapun gelar kekuatan kewilayahan TNI AU di IKN terbagi atas: Koopsud I, dengan gelar satuan Lanud Supadio di Pontianak dan Koopsud II, dengan gelar satuan diantaranya: Lanud Syamsudin Noor di Banjarmasin, Lanud Dhomber di Balikpapan, Lanud Iskandar di Pangkalan

Bun, dan Komando Sektor (Kosek) II (Satrad 233/Bpp di Balikpapan dan Satrad 225/Trk di Tarakan). Terkait Lanud yang ada di wilayah IKN bertugas dalam melaksanakan kegiatan intelijen pengamanan, operasi udara, keamanan dan pertahanan Pangkalan. Selain itu Lanud juga melakukan pembinaan kemampuan pelaksanaan tugas-tugas operasi udara dan pembinaan potensi kedirgantaraan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, TNI AU juga didukung Satuan Radar (Satrad) yang bertugas mengawasi hal-hal yang dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia.

Gambar 10. Gelar Satuan TNI AU di Wilayah IKN Saat Ini



Sumber: Srenad (2022)

Berdasarkan hal diatas maka dapat dipahami bahwa selain mempertimbangkan ancaman dalam penetapan IKN dari jenis/kategori ancamannya, diperlukan juga pertimbangan terhadap dinamika ancaman berdasarkan ketiga matra TNI (darat, udara, dan laut). Hal ini dilakukan agar tiap-tiap matra dapat mengantisipasi secara dini dan mempersiapkan penanganannya

baik melalui OMP maupun OMSP sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Berikut kategorisasi potensi ancaman di IKN berdasarkan ketiga matra TNI:³⁸

a. Matra Darat.

- 1) Sengketa batas wilayah negara yang dapat menimbulkan konflik antara Indonesia dan Malaysia pada wilayah perbatasan darat sepanjang +2.062 km.
- 2) Gelar kekuatan militer darat Malaysia di Malaysia Timur dan negara sekitar lainnya yang semakin dekat dengan posisi IKN.
- 3) Konflik sosial antar etnis/SARA yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan karena adanya komposisi penduduk yang beragam di wilayah tersebut.
- 4) Aksi terorisme di wilayah Kalimantan Timur karena menjadi jalur terdekat Indonesia dengan negara Filipina yang merupakan basis teroris terbesar di kawasan Asia.
- 5) Bencana alam, terutama kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

b. Matra Laut

- 1) Keberadaan kekuatan militer asing yang melakukan pelanggaran wilayah laut di sekitar ALKI I, ALKI II, dan perairan Laut Jawa yang membentang di sekitar Pulau Kalimantan, dapat memicu konflik antara negara.
- 2) Kekuatan militer laut Malaysia di Sabah dan Serawak, yang berdekatan dengan wilayah IKN, harus diperhitungkan dalam mengantisipasi potensi ancaman dari luar negeri.
- 3) Konflik Laut Cina Selatan yang terjadi di kawasan strategis dan merupakan jalur perdagangan penting dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan di IKN. Situasi politik terkait Laut Cina Selatan belum menemukan titik temu penyelesaian, terutama antara negara-negara claimant state seperti Malaysia, Vietnam, dan Taiwan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka.

³⁸ *Ibid.*

4) Ancaman non tradisional berupa kegiatan pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, dan penyelundupan narkoba yang memanfaatkan laut sebagai media transportasi, dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan IKN.

c). Matra Udara

1) Terdapat penerbangan yang memanfaatkan jalur udara ALKI, Selat Malaka, dan wilayah udara internasional untuk melakukan pelanggaran kedaulatan dan kegiatan ilegal dengan menggunakan pesawat berawak atau tidak berawak (*Unmanned Aerial Vehicle*) yang memiliki keunggulan dalam *observation*, *surveillance*, dan *reconnaissance*.

2) Wilayah udara Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina.

3) Terdapat penerbangan yang dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa ijin atau tidak sesuai dengan rute yang diijinkan dengan memanfaatkan kelemahan pertahanan udara yang belum ter-cover (*blank spot area*) oleh jangkauan Radar Hanud. Selain itu, jumlah dan disposisi pesawat tempur TNI AU yang dislokasi di lokasi yang cukup jauh dari IKN juga menjadi faktor penyebabnya.

d) Penggunaan wilayah dan jalur penerbangan yang melewati *Flight Information Region* (FIR) Singapura untuk kegiatan latihan udara negara tetangga maupun dalam rute penerbangan internasional juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk itu penting untuk memiliki sistem komunikasi dan koordinasi yang baik antara otoritas pertahanan udara dan pihak-pihak terkait dalam mengelola FIR. Hal ini akan memungkinkan respons yang efisien terhadap ancaman dan menjaga keamanan wilayah udara nasional.

Terkait dengan hal diatas, maka penggunaan strategi yang diterapkan TNI terdiri dari dua macam, yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan menggunakan kekuatan TNI yang sudah disiagakan. Secara umum pelaksanaan strategi tersebut mengacu pada Perpang

TNI nomor 66 tahun 2010 tentang Strategi Militer yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. TNI melaksanakan OMP untuk menghadapi agresi dan konflik bersenjata dengan suatu negara atau lebih dilaksanakan dengan sistem pertahanan negara bersifat semesta melalui tahapan-tahapan penangkalan, penindakan, dan pemulihan.
- b. Penangkalan dilaksanakan dengan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui kegiatan dan operasi militer sesuai kebijakan dan politik negara meskipun belum ada pernyataan perang oleh Presiden. TNI juga bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam upaya membangun kekuatan secara terus menerus. Operasi yang dilaksanakan berupa operasi intelijen, operasi teritorial dan lain sebagainya.
- c. Penindakan dilaksanakan dengan strategi yang menggunakan kekuatan TNI sesuai kebijakan dan keputusan politik negara dan/atau setelah adanya pernyataan perang oleh Presiden. Strategi penindakan yang dilaksanakan bersifat defensif aktif dengan menggunakan pola pertahanan berlapis. Tindakan yang dilakukan adalah menghancurkan musuh dipangkalannya, dalam perjalanan, dan setelah masuk ke wilayah IKN. Selanjutnya apabila musuh berhasil merebut dan menguasai seluruh atau sebagian wilayah IKN maka dilaksanakan perang berlarut dengan taktik gerilya.
- d. Pemulihan dilaksanakan berupa operasi militer dan kegiatan pemulihan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara terkait persetujuan gencatan senjata. Operasi yang dilaksanakan yaitu operasi pemindahan kebelakang, operasi teritorial dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi yang sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Adapun TNI melaksanakan OMSP untuk menghadapi ancaman bersenjata, ancaman non militer, dan gangguan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penangkalan dilaksanakan dengan strategi menggunakan kekuatan TNI melalui kegiatan dan operasi militer dalam rangka menangkal ancaman bersenjata, ancaman non militer dan gangguan. Kegiatan yang dilaksanakan

antara lain diplomasi militer, pemberdayaan wilayah pertahanan yang bersinergi dengan POLRI, Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Operasi yang dilaksanakan antara lain adalah operasi mengatasi pemberontakan bersenjata, operasi pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi membantu pemerintah di daerah, operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam dan lain-lain.

b. Penindakan dilaksanakan dengan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui operasi militer untuk menindak langsung lawan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, misalnya pernyataan status darurat sipil atau darurat militer. Dalam menghadapi ancaman bersenjata dilakukan operasi mengatasi pelanggaran wilayah, operasi pengamanan wilayah dan lain-lain. Dalam menghadapi ancaman non militer, TNI membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bencana, teknologi dan legislasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur K/L terkait. Dalam mengatasi gangguan terhadap kelancaran pembangunan dan pencapaian kepentingan nasional, TNI melaksanakan operasi dan kegiatan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu operasi pemberdayaan wilayah pertahanan dan lain-lain, dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan teritorial, operasi membantu Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.

c. Pemulihan dilaksanakan dengan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui operasi militer dan kegiatan pemulihan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, antara lain rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi yang bersinergi dengan dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

Sebagai wilayah strategis, IKN seperti wilayah lain di Indonesia juga memiliki potensi bencana alam yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pertahanan semesta. Hal ini perlu dipahami karena Indonesia secara geografis terletak di cincin Api Pasifik, yang merupakan daerah yang rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun sistem pertahanan semesta yang responsif terhadap bencana alam di wilayah IKN: Evaluasi resiko

bencana untuk membantu dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat; Perencanaan bencana yang terintegrasi untuk menghadapi berbagai jenis bencana alam di wilayah IKN. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi; Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk menginformasikan penduduk dan pihak terkait tentang ancaman bencana alam; Pelatihan dan kesadaran masyarakat tentang tindakan pengurangan risiko bencana; Penanganan pasca-bencana terhadap dampak bencana alam, termasuk pemulihan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pastikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan organisasi kemanusiaan untuk pemulihan yang efektif; Teknologi dan infrastruktur untuk mendukung deteksi dini, pemantauan, dan respons terhadap bencana alam. Ini termasuk penggunaan sistem komunikasi yang tangguh, jaringan komputer yang kuat, dan teknologi penginderaan jauh untuk pemetaan dan pemantauan bencana; serta kolaborasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, beberapa potensi bencana alam di IKN meliputi:

a. Banjir, IKN memiliki potensi besar terhadap rawan banjir tersebar di Hilir DAS Riko Manager DAS Samboja dan DAS Makaham. Sebagai contoh peristiwa bencana alam banjir yang menimpa wilayah IKN tahun 2023 di kelurahan Sepaku, Maret 2023 dengan penyebab /kronologis Peringatan Dini BMKG pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 19:31 WITA, 21:30 WITA, 22:25 WITA, 04:48 WITA bahwa berpotensi terjadi hujan sedang-lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kecamatan Sepaku, Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di daerah hulu mengakibatkan adanya kiriman air yang membuat air sungai meluap dan berdampak pada naiknya tinggi muka air. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu :

- 1) Penanaman melalui rahabilitasi hutan seluas 914 ha di KIPP dan KIKN pada tahun 2022.
- 2) Rehabilitasi lahan berupa kebun bibit rakyat seluas 1.784 ha dari tahun 2017 s.d 2022.

3) Rehabilitasi kebun bibit desa seluas 750 ha dari tahun 2019 s.d 2022.

b. Longsor, Kerawanan Longsor mengikuti pola sebaran lereng perbukitan yang memiliki kemiringan terjal.

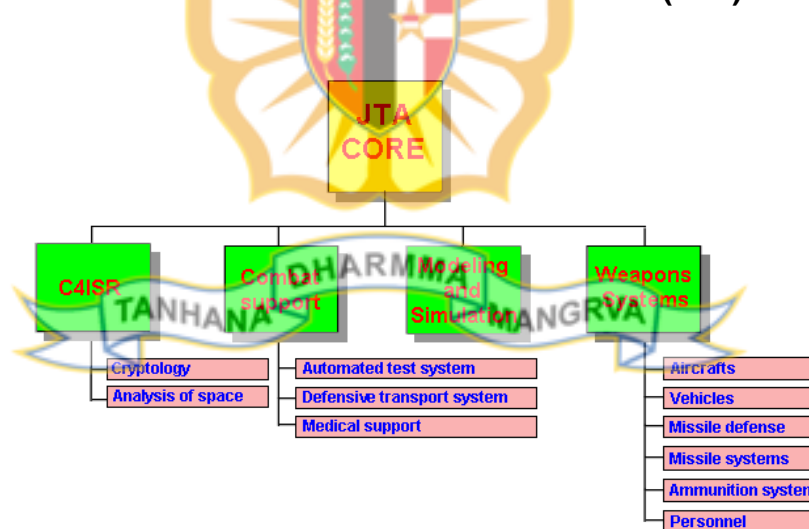
Dalam menghadapi potensi bencana alam dan ancaman non-militer ini, penting untuk mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana, keamanan, dan pertahanan dalam sistem pertahanan semesta di IKN. Kerja sama antara lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangatlah penting dalam mengidentifikasi dan mencegah ancaman ini. Selain bencana alam, ada juga ancaman non-militer lainnya yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pertahanan semesta di IKN. Beberapa ancaman non-militer meliputi, Ancaman Teroris merupakan ancaman serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Kelompok teroris dapat mengancam stabilitas dan keamanan di IKN melalui serangan bom, serangan senjata api, atau serangan lainnya. Pencegahan terorisme, peningkatan keamanan publik, dan kerja sama intelijen adalah langkah penting untuk mengatasi ancaman ini. Ancaman selanjutnya yaitu serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur informasi, mencuri data sensitif, atau mengganggu sistem komputer dapat mengganggu operasional pemerintahan dan aktivitas ekonomi di IKN. Perlindungan dan keamanan siber yang kuat, termasuk pemantauan, deteksi dini, dan respons yang cepat, diperlukan untuk menghadapi ancaman ini. Ancaman non militer lainnya yaitu konflik sosial, baik yang bersifat etnis, agama, politik, atau sosial, dapat mengancam stabilitas dan keamanan di IKN. Penting untuk mendorong dialog, mempromosikan toleransi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan untuk mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan.

15. Membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN.

Pertahanan bagi IKN merupakan bagian integral dari sistim pertahanan negara. Berdasarkan analisa dari banyak peristiwa, maka didalam membangun sistem pertahanan yang kuat hendaknya memperhatikan unsur-unsur pertahanan, seperti: (1) memiliki sistem deteksi dini, baik berupa sistem pengamatan maupun

sistem pengintaian; (2) memiliki sistem komando dan kendali yang dapat mengintegrasikan data-data olahan dari deteksi dini; dan (3) memiliki satuan penindak dengan kekuatan dan kemampuan yang memadai serta dengan kesiapsiagaan yang tinggi. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, di kapal perang TNI AL (KRI), terutama yang dikelompokkan sebagai kapal kombatan, di dalamnya terdapat bagian kesenjataan yang disebut *Sewaco (Sensor, Weapon and Command Control)*. Bagian ini bisa menjadi inspirasi dalam membangun sistem pertahanan di IKN, karena *Sewaco* tersebut bicara tentang sistem deteksi atau *sensor*, sistem pengolah data sadapan dari sensor yaitu *Command Control* dan sistem penindak dalam hal ini senjata atau *Weapon*. Contoh lain, ketika melihat bagaimana Amerika Serikat dalam membangun sistem pertahanannya, misalnya saja dalam *Joint Technical Architecture (JTA)* yang versi 4.0, maka dapat dikembangkan untuk sistem pertahanan nasional yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Adapun *JTA* itu sendiri adalah sebagai berikut:

Gambar 11. Joint Technical Architecture (JTA)



Sumber: [https://www.semanticscholar.org/paper/Open-and-Common-Software-Systems-Joint-Technical-%3A-Kerner \(2021\)](https://www.semanticscholar.org/paper/Open-and-Common-Software-Systems-Joint-Technical-%3A-Kerner+(2021))

Dalam konteks Indonesia, sebetulnya konsep ini sudah diterapkan melalui C4ISR atau yang dikenal dengan K4IPP dimana untuk satuan penindak, Indonesia mempunyai TNI sebagai unsur penting dalam menghadapi ancaman militer sedangkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menghadapi ancaman non

militer. Hal ini sebetulnya sejalan dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) yang diusung pemerintah dalam pertahanan negara. Dalam Sishanta pada dasarnya telah dijelaskan di dalam UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Perihal sistem pertahanan ini diperkuat dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan Sishanta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan seluruh sumber daya nasional secara terpadu, terarah dan berkelanjutan dalam upaya menegakkan kedaulatan negara serta menjaga keselamatan bangsa dari berbagai ancaman yang ada. Terkait dengan komponen pertahanan terbagi atas komponen utama, cadangan dan pendukung dimana kesemuanya memiliki peran strategis di dalam menjaga keutuhan bangsa (lihat pasal 1 ayat 5, 6 dan 7). Mengacu pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan Sishanta difokuskan pada upaya membangun kesadaran atas hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dimana hal tersebut menjadi penting untuk dipahami agar dapat membantu di dalam keberlangsungan bernegara. Adapun pada konteks ini sistem pertahanan yang diterapkan Indonesia memiliki sifat *inward looking*, yaitu berusaha mencemati persoalan yang ada di dalam serta mencoba menyelesaikannya. Hal ini dilakukan jika terjadi perang terjadi di Indonesia yang menimbulkan berbagai ancaman atau potensi ancaman maka dapat segera diatasi sehingga tidak menimbulkan eksese buruk bagi stabilitas nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa Sishanta memiliki cakupan yang cukup luas karena tidak hanya menyangkut *hard power* namun juga berhubungan erat dengan membangun *soft power* yang sifatnya sangat dinamis dan kompleks. Hal ini menjadi penting dilakukan karena saat ini ancaman tidak hanya identik dengan perang secara fisik, namun juga berkembang ke arah yang multidimensional. Oleh karena itu maka perlu dibangun Sishanta dalam kerangka sistem K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengintaian, dan Pengamatan) guna menghadapi kompleksitas ancaman baik yang bersifat militer maupun non-militer.

Melalui Sishanta dalam konteks K4IPP maka akan dititikberatkan pada membangun integrasi semua komponen pertahanan Indonesia untuk menghadapi ancaman militer dan non-militer di wilayah IKN. K4IPP dapat digunakan dalam mengoordinasikan komando dan kendali operasional dalam pembangunan postur pertahanan negara meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar melalui pemenuhan sistem pertahanan negara dengan cara penggelaran kemampuan dan kekuatan TNI yang disesuaikan dengan potensi kerawanan & prediksi datangnya ancaman sehingga terwujud daya tangkal yg kuat di area IKN. Selanjutnya dapat memfasilitasi komunikasi antara komponen utama dengan pembangunan satelit guna memperkuat kemampuan penginderaan jarak jauh dan komunikasi, menyediakan intelijen dan informasi yang diperlukan serta memantau situasi dan melakukan pengintaian dan pengamatan di wilayah IKN.

Disamping itu juga dari sistem ini tidak lain bertujuan untuk menciptakan sinergi dan kerja sama yang efektif antara semua komponen pertahanan, sehingga dapat merespons ancaman dengan profesionalitas dan proporsionalitas. Hal ini sejalan dengan sistem pertahanan berlapis (Zona Penyangga, Zona Pertahanan Udara, Zona Perlawanan, Daerah Pertempuran, Daerah Komunikasi dan Daerah Belakang) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menekankan keterpaduan antara berbagai komponen sehingga terbangun sistem pertahanan yang kuat. Terkait dengan hal tersebut, sistem pertahanan berlapis dalam konteks K4IPP akan melibatkan seluruh komponen yang ada seperti Komponen Utama dalam sistem K4IPP meliputi TNI (AD, AL, dan AU). TNI bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah udara, laut, dan darat, serta melakukan operasi militer jika diperlukan dalam menghadapi ancaman militer. Komponen Cadangan terdiri dari masyarakat sipil yang terorganisir dalam struktur pertahanan sipil. Komponen ini dilibatkan dalam kegiatan pertahanan seperti penyediaan informasi intelijen, pemantauan wilayah, evakuasi warga sipil, dan pemulihan pasca-bencana. Komponen Cadangan dapat dilibatkan dalam menanggapi ancaman non-militer yang memerlukan keterlibatan militer. Sedangkan Komponen Pendukung melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas akademik. Komponen ini berperan dalam mendukung dan memperkuat sistem pertahanan

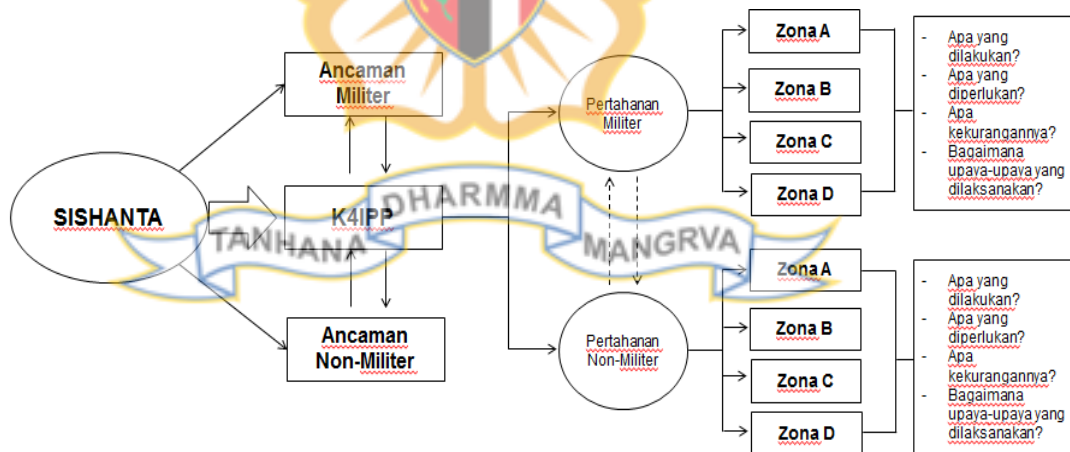
negara, seperti Kemhan, Kepolisian, BNPB, Litbang dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran K4IPP dalam komponen pendukung adalah menyediakan sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengintaian, dan pengamatan yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional serta koordinasi antara lembaga dan organisasi yang terlibat. Dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer di wilayah IKN, K4IPP berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan fungsi-fungsi penting dalam operasi pertahanan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pertahanan berlapis dan skema K4IPP merupakan dua konsep yang saling terkait dan dapat digunakan bersamaan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan suatu wilayah. Sistem pertahanan berlapis merujuk pada pendekatan pertahanan yang melibatkan penggunaan beberapa lapisan atau tingkat pertahanan yang berbeda untuk melindungi suatu wilayah atau target dari ancaman. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa memiliki beberapa lapisan pertahanan yang saling mendukung dapat meningkatkan efektivitas pertahanan dan mempersulit upaya musuh untuk mencapai target yang diincar. Pada setiap lapisan, dapat digunakan berbagai jenis sistem dan teknologi pertahanan, seperti pertahanan udara, pertahanan rudal, pertahanan pantai, pertahanan siber, dan sebagainya. Setiap lapisan bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons ancaman yang datang dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Konsep ini memberikan tingkat fleksibilitas dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap berbagai jenis yang mungkin timbul. Skema K4IPP merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai fungsi kunci dalam operasi militer dan keamanan. Skema ini mencakup komando dan kontrol operasional, pengawasan dan pengendalian, pertukaran informasi melalui komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi komputer dan sistem informasi, pengumpulan dan analisis intelijen, pengintaian aktif, dan pengamatan situasional.

Oleh sebab itu maka dapat dipahami bahwa skema K4IPP digunakan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut agar bekerja bersama-sama dalam mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman situasional,

memungkinkan respons yang cepat dan tepat terhadap ancaman, dan memaksimalkan efektivitas operasi militer dan keamanan. Dalam konteks pertahanan berlapis, skema K4IPP dapat diterapkan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan sistem pertahanan pada setiap lapisan pertahanan. Melalui integrasi K4IPP, informasi intelijen dari pengintaian dan pengamatan dapat digunakan untuk mengarahkan sistem pertahanan di setiap lapisan, komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi secara real-time, dan komando dan kendali yang efisien memastikan koordinasi operasional yang optimal. Dengan menerapkan kedua konsep ini, sistem pertahanan suatu wilayah dapat menjadi lebih terintegrasi, adaptif, dan efektif dalam menghadapi ancaman yang beragam sehingga diharapkan sistem ini mampu memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepentingan negara dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut, maka pola atau skema Sistem Pertahanan Semesta dalam kerangka K4IPP dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 12. Pola Sistem Pertahanan Semesta dalam kerangka K4IPP



Sumber: diolah penulis (2023)

a. Membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman militer di wilayah IKN.

Sishanta yang dikembangkan bangsa Indonesia mengacu pada kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi wilayah yang strategis yang dimiliki, yaitu berada diantara dua benua dan dua samudera sehingga secara tidak

langsung memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan yang mungkin saja terjadi. Letak wilayah Indonesia yang strategis tersebut, tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga ancaman keamanan yang besar, antara lain ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Untuk itu maka diperlukan langkah strategis dalam kerangka K4IPP, dimana pembangunan pertahanan dilakukan secara terintegrasi, sistem pertahanan dapat lebih responsif, efisien, dan efektif dalam menghadapi ancaman militer. Sinergi antara komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengintaian, dan pengamatan membantu memastikan bahwa respon pertahanan dapat dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan berdasarkan pemahaman yang baik tentang situasi dan ancaman yang dihadapi. Dalam konteks ini TNI memiliki peran strategis dalam sistem pertahanan negara sebagaimana diamanatkan UUD tahun 1945 pasal 30.

Terkait dengan hal tersebut, maka untuk membangun K4IPP dalam konteks ancaman militer, maka beberapa langkah dan faktor penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Analisis Ancaman. Langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap ancaman militer yang mungkin dihadapi di wilayah IKN. Analisis ini mencakup identifikasi potensi ancaman, seperti invasi militer, serangan rudal, serangan teroris, dan ancaman *cyber*. Dalam analisis ini, perlu melibatkan ahli pertahanan, intelijen, dan keamanan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ancaman yang mungkin timbul.
- 2) Perencanaan Pertahanan. Berdasarkan hasil analisis ancaman, langkah selanjutnya adalah merencanakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen, termasuk Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Perencanaan ini mencakup pemilihan dan penempatan sistem pertahanan yang sesuai, seperti pertahanan udara, pertahanan darat, pertahanan laut, serta infrastruktur dan teknologi pendukung.
- 3) Koordinasi dan Integrasi. Pembangunan sistem pertahanan semesta memerlukan koordinasi dan integrasi yang erat antara semua komponen

pertahanan, termasuk TNI, POLRI, BIN, dan lembaga lainnya yang terkait dengan keamanan nasional. Koordinasi ini meliputi pembentukan komando operasional yang berfungsi untuk mengoordinasikan dan mengendalikan operasi pertahanan di wilayah IKN.

4) Peningkatan Kemampuan Personel. Pembangunan sistem pertahanan semesta juga memerlukan peningkatan kemampuan personel yang terlibat. Ini termasuk pelatihan dan pendidikan yang intensif dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta pembentukan unit khusus yang memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi ancaman militer yang kompleks.

5) Pemanfaatan Teknologi. Teknologi yang canggih memainkan peran penting dalam membangun sistem pertahanan semesta yang efektif. Pemanfaatan teknologi komunikasi, komputer, pemantauan, pengintaian, dan pengamatan sangat penting dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan cepat dan akurat.

Mencermati berbagai kondisi ancaman yang dihadapi Indonesia tersebut tentu diperlukan upaya meningkatkan kemampuan pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan negara. Upaya meningkatkan kemampuan pertahanan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM serta peralatan yang memadai sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang terutama ancaman militer. Dalam membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta terutama dalam menghadapi ancaman militer di wilayah IKN, maka perlu dirancang pembangunan pertahanan yang komprehensif di wilayah tersebut. Dalam konteks militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa TNI mengemban tugas yang cukup berat. Untuk itu mengacu pada Rencana Pembangunan Satuan IKN dilakukan dengan membangun gelar satuan TNI untuk pengamanan IKN Nusantara di Kalimantan Timur harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berpotensi menjadi ancaman militer dan nonmiliter. Gelar satuan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan terpadu dengan mempertimbangkan rencana induk dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN. Dalam penyusunan gelar satuan TNI juga mempertimbangkan zonasi IKN yang terdiri dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) dan Kawasan

Pengembangan Ibu Kota Negara (KP-IKN). Hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas area 6.671 Ha. Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi Istana Negara, kantor Lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), Markas Besar TNI/Polri, Mako Paspampres, dan Rumah Dinas VIP (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, Eselon 1 dan 2).
- b. Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) dengan luas area 56.180 Ha. Rencana pembangunan satuan TNI yang akan dilaksanakan, meliputi Makodam IKN, Mabrigif, Yon Mekanis, Resimen dan Yon Arhanud A, Yon Armed, Yon Perhubungan, Kodim Tipe A.
- c. Untuk Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KP-IKN) dengan area seluas 199.962 Ha. Rencana pembangunan satuan TNI yang akan dilaksanakan meliputi Yonzipur, Flat Penerbad, Mabrig Kav, Yon Kav, Kodim B, dan Yon Arhanud B, Kodamar, Faslabuh, Mako Pasmars, dan Lantamal, Lanud IKN dan Satrudal jarak sedang.

Kemudian berdasarkan perspektif geostrategis, ibu kota Nusantara (sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi negara) memegang posisi yang strategis. Namun, karena peran dan signifikansi yang dimilikinya, IKN juga memiliki kerentanan terhadap ancaman yang beragam sehingga kondisi tersebut perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak sistemik. Berikut adalah beberapa faktor geografis yang dapat mempengaruhi kerentanan IKN terhadap ancaman, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak jalur maritim yang menghubungkan wilayah-wilayahnya. Kondisi ini membuat akses maritim menjadi penting bagi perekonomian negara dan mobilitas penduduk. Namun, hal ini juga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman melalui serangan maritim.

Secara umum prediksi ancaman ibu kota negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbatasan darat dengan Malaysia 2.062 Km.
- b. *Trans-National Crime* dan *Terrorist Transit Triangle*.
- c. Dari arah Barat, berpotensi adanya konflik terbuka di LCS.
- d. Sebelah Timur, berpotensi kerawanan pada ALKI – II.

- e. Dari arah Utara, dekat dengan Malaysia dan masuk dalam jangkauan Senjata Negara tersebut, dalam Radius Jelajah rudal balistik dan Rudal Hypersonic (India, China & Korut)
- f. Mendekati *Flight Information Region* (FIR) Negara Tetangga (Singapura FIR, Kinabalu FIR, Manila FIR)
- g. Adanya *Five Powers Defence Arrangement* (FPDA), *Australia United Kingdom dan United States of America* (AUKUS), *One Belt One Road* (OBOR) dan *Belt and Road Initiative* (BRI).

Mengacu pada uraian diatas maka dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai *center of gravity* negara Indonesia, perlu dilaksanakan penyesuaian strategi pertahanan negara secara menyeluruh Sistem pertahanan di IKN dilaksanakan melalui Sishankamrata dan strategi pertahanan berlapis yang cerdas (*Smart Defence*). Hal itu sebagai bagian dari strategi pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya nasional. Dalam UU RI No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, diamanatkan bahwa pembangunan pertahanan Ibu Kota Nusantara yang tangguh memiliki kemampuan penangkalan dalam suatu sistem dan strategi pertahanan berlapis dengan mengadopsi *Smart Defense* dan *Dual Strategy*. Artinya bahwa sistem pertahanan yang dibangun menyinergikan *hard defense* (pertahanan militer) dengan *soft defense* (pertahanan nirmiliter), yang kemudian diselaraskan dengan diplomasi sebagai wujud dari *dual strategy* sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas yang terintegrasi dan terkoordinasi sehingga mampu menangkal dan menindak, serta menghancurkan setiap ancaman secara efektif dan efisien.

Sistem pertahanan ibu kota merupakan bagian dari site pertahanan negara yang memiliki konsep pertahanan semesta (*total defense*) yang terpadu, *deterrence*, defensif aktif dan strategi pertahanan berlapis. Dalam upaya-upaya yang dilaksanakan agar tetap memasukkan rencana pembangunan dan gelar kekuatan satuan TNI dan Kemhan di wilayah IKN yaitu dengan membangun pertahanan negara berbasis *Anti Access/Area Denial* (A2/AD) di IKN dalam rangka keamanan nasional. *Anti-Access/Area Denial* (OR A2/AD) adalah strategi militer untuk mengontrol akses ke dan di (anti akses) dalam lingkungan operasi,

berupa tindakan dan kemampuan pertahanan negara yang dirancang untuk mencegah kekuatan lawan memasuki area operasional di IKN.

Terkait dengan hal tersebut, maka rencana pemenuhan Sishanneg untuk mendukung pembangunan pertahanan di wilayah IKN: Kemhan: Satelit Pertahanan dan alat komunikasi; Mabes TNI: Alpernika dan anti drone; TNI AD: Pembentukan Menarhanud dan 2 Yon Arhanud; TNI AL: Satkapal Koarmada II dan Yon Arhanud Pasmal IKN (Samboja); dan TNI AL: Satkapal Koarmada II Yon Arhanud Pasmal IKN (Samboja).

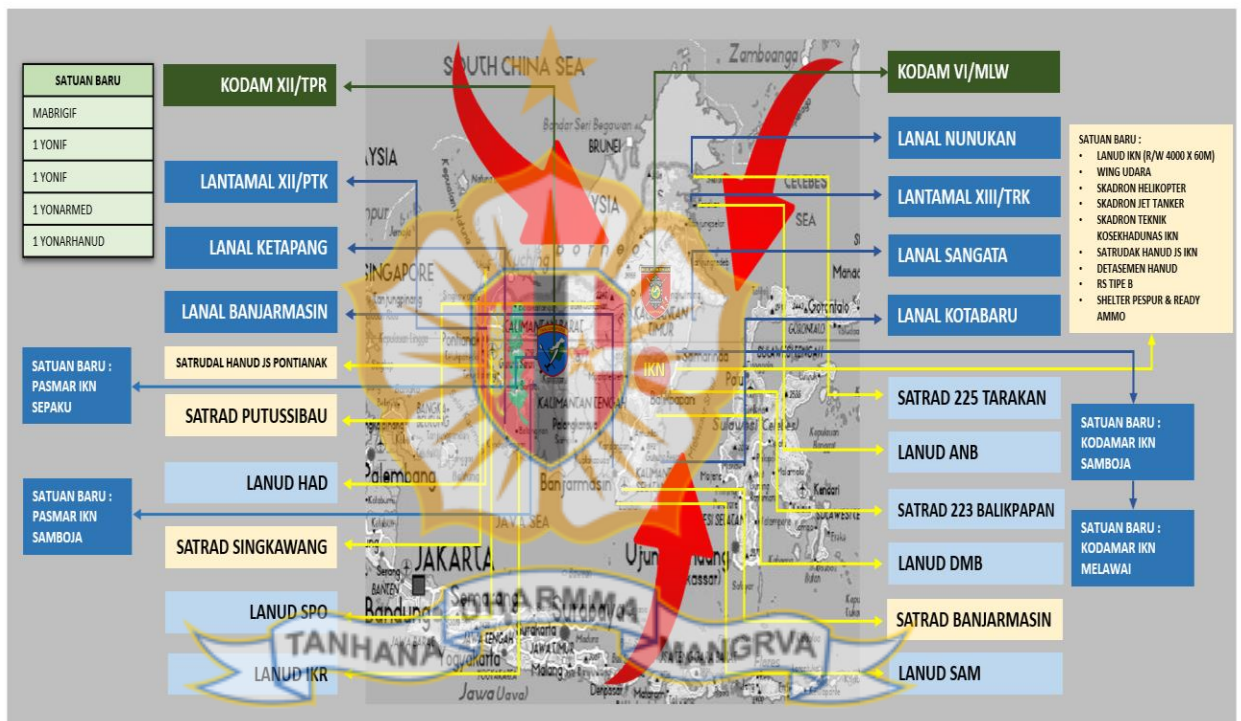
Perihal konsep gelar satuan TNI AD pada dasarnya dapat terlihat pada Pembentukan Kodam Khusus IKN. Kodam Khusus IKN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengamanan VVIP, pengamanan objek vital TNI, mendukung kegiatan keprotokolan, kegiatan nasional dan internasional di IKN. Adapun gelar satuan Kodam Khusus IKN, terdiri dari: Makodam dan Balakdam meliputi satuan zenit, peralatan, perhubungan, perbekalan, kesehatan, ajudan jenderal (Ajen), keuangan, Polisi Militer (POM), hukum, penerangan, infolakta, bintal, jasmani, administrasi veteran (Minvet), topografi dan denintel; Brigif Mekanis IKN, Brigkav, Yonarmed 155/GS, Menarhanud, Yonzipur IKN, Yonhub IKN, 2 Satkowil (Kodim) tipe A, dan Unsur pendukung (BKO).

Sebagai satuan penting dalam matra laut, pembangunan Satuan TNI AL di IKN menjadi perlu dilakukan. Hal ini terdiri atas:

- 1) Validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Kodamar, dengan Mako, Satuan Kapal Patroli dan Fasharkan berada di Melawai, sementara Satuan Kapal Eskorta dan Satuan Kapal Cepat (relokasi), Yonmarhanlan (satuan baru), Den Kopaska (satuan baru) dan Faslabuh berada di Samboja.
- 2) Pasmal IKN, yang terdiri dari:
 - a) Pasmal Sepaku, terbagi atas: Subden Mako Kormar, Mako Pasmal, Yonif 14, Kompi Kavaleri, Raipur A Howitzer, Raipur B GS, Den Banpur (-), Den Zeni (-), dan Dentaifib.
 - b) Pasmal Samboja, terdiri dari: Mako Brigif 5, Yonif 15, Yonif 16, Yonkav (-), Yonarmed (-), Yon Arhanud (-), Denbanpur Komposit, Denzeni Komposit, dan Denlanmar.
- 3) Lanudal tipe B di Sepinggan.

Lebih lanjut secara umum pembangunan Satuan TNI AU di wilayah Kalimantan dalam rangka mendukung pertahanan di IKN, terdiri dari: Lanud IKN (Run Way 4000 X 60 M), Wing Udara, Skadron Helikopter, Skadron Jet Tanker, Skadron Teknik Kosekhanudnas IKN, Satrudal Hanud Jarak Sedang IKN, Detasemen Hanud, Rumah Sakit tipe B, dan Shelter Pesawat tempur dan Ready Ammo. Oleh sebab itu terlihat baik TNI AD, AL dan AU memiliki peran penting di dalam mewujudkan sistem pertahanan yang tangguh. Hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 13. Konsep Gelar Satuan TNI



Sumber: Kemhan (2023)

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dipahami bahwa gelar satuan TNI baik dari AD, AL dan AU saling terkait dan terintegrasi sehingga perlu dipahami dengan baik khususnya di dalam menghadapi kompleksitas ancaman militer yang semakin dinamis melalui penerapan sistem pertahanan berlapis sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut maka konsep pertahanan berlapis di zona-zona yang ada dalam menghadapi ancaman militer dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Zona Penyangga. Dalam konteks ini, zona penyangga pada dasarnya merupakan area atau wilayah yang dibentuk atau dijaga oleh sebuah negara sebagai bentuk pertahanan atau pengamanan untuk melindungi wilayah inti negara dari ancaman militer yang mungkin datang dari negara tetangga atau pihak-pihak yang bermaksud jahat. Tujuan dari zona penyangga pertahanan adalah untuk memberikan ruang dan waktu bagi pasukan pertahanan untuk merespons ancaman, mengatur pergerakan militer, dan melindungi wilayah inti negara. Zona Penyangga Pertahanan dapat memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebijakan keamanan negara yang bersangkutan. Menghadapi ancaman militer seperti invasi, serangan pasukan militer negara lain, pelanggaran wilayah, separatisme dan lain sebagainya maka TNI sebagai *leading sector* mengemban tugas mengatasi ancaman tersebut namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah seperti kesiapan SDM, peralatan serta koordinasi. Terkait dengan hal tersebut dalam zona, K4IPP memiliki peran strategis di dalam komponen Komando dan Kendali yang bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan strategis dan taktis dalam menghadapi ancaman invasi atau agresi melalui kemampuan pengintaian, intelijen dan pengamatan. Untuk itu perlu melibatkan perencanaan operasional, koordinasi taktis, dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menghadapi ancaman yang muncul. Selain itu dukungan sarana prasarana pendukung juga diperlukan dalam mendukung pertahanan pada zona penyangga. Adapun zona ini peran pemerintah (K/L terkait) serta masyarakat juga diperlukan dalam mencegah konflik. Dengan demikian akan terbangun pertahanan IKN yang tangguh dengan memiliki kemampuan, penangkalan dalam suatu sistem pertahanan yang berlapis dan cerdas (*smart defence*). Dalam konteks *smart defence* agar dapat lebih baik maka perlu mengoptimalkan keberadaan drone dalam memperkuat pertahanan negara karena memiliki peran strategis, diantaranya: sebagai bagian intelijen dengan melakukan pengintaian udara tanpa risiko bagi personel militer; melancarkan serangan terhadap target musuh yang didasarkan pada kecepatan, ketepatan, dan mobilitas menjadikannya pilihan yang efektif dalam serangan

terhadap musuh; mendukung operasi dalam formasi yang terkoordinasi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara; dan dalam lingkup lain drone mampu difungsikan dalam memberikan bantuan dalam mencari korban yang terjebak, memetakan wilayah yang terdampak, mengirimkan pasokan medis atau logistik, dan memberikan komunikasi darurat dalam situasi bencana alam.

2) Zona Pertahanan Udara. Dalam membangun pertahanan militer zona ini terutama di wilayah IKN maka dapat dilakukan dengan pengoptimalan K4IPP melalui sistem radar dan sensor lainnya yang dapat mendeteksi pesawat terbang, rudal, atau ancaman udara lainnya. Sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau ruang udara dan mengidentifikasi ancaman potensial. Setelah ancaman terdeteksi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis dan sumber ancaman tersebut. Upaya ini melibatkan penggunaan teknologi dan sistem komunikasi yang canggih untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi ancaman yang ada. Oleh sebab itu pada zona ini perlu dilengkapi dengan sistem persenjataan udara yang dapat menghadapi ancaman. Namun demikian dalam masih terdapat kekurangan seperti jaringan atau sistem yang terbangun, serta sarana prasarana pendukung. Untuk itu diperlukan upaya terukur dan terintegrasi dengan sistem pertahanan lainnya, termasuk pertahanan darat, laut, dan ruang angkasa. Koordinasi yang baik antara unit-unit pertahanan berbeda memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, respons yang terkoordinasi, dan efektivitas yang lebih baik dalam melawan ancaman udara. Koordinasi dalam hal ini dapat melibatkan K/L terkait seperti BIN dalam mendeteksi dan menganalisis ancaman potensial terhadap pertahanan udara negara dan LAPAN dalam pengembangan teknologi pertahanan udara, seperti sistem sensor dan pengamatan udara.

3) Zona Perlawanan. Pada dasarnya zona ini merujuk pada area atau wilayah tertentu di sekitar IKN di mana pasukan militer mengadopsi strategi dan taktik untuk melawan dan menghadapi ancaman militer yang mungkin muncul. Tetapi kesiapan zona ini masih menghadapi potensi masalah seperti penerapan sistem deteksi yang belum baik serta koordinasi yang belum

optimal. Untuk itu maka upaya yang dapat dilakukan terkait zona ini melalui kerangka K4IPP dengan melaksanakan pertahanan teritorial di sekitar IKN dengan menempatkan pasukan di pos-pos pertahanan strategis. Hal ini akan melibatkan pengaturan pos-pos pengawasan, patroli, dan pemantauan untuk mendeteksi dan melaporkan ancaman yang masuk ke wilayah IKN; Pemasangan sistem pertahanan rudal udara-ke-udara, sistem pertahanan permukaan-ke-udara, atau pesawat tempur yang siap untuk melindungi langit IKN dan menangkal ancaman udara musuh; Membangun sistem komunikasi yang terpadu dan andal antara unit-unit militer yang terlibat. Dalam upaya ini dapat melibatkan K/L lain sehingga terbangun sebuah sistem pertahanan yang kuat dimana TNI tetap menjadi *leading sector* dalam menghadapi ancaman militer tersebut.

4) Daerah Pertempuran. Dalam upaya menghadapi ancaman militer di wilayah IKN, maka daerah pertempuran yang merupakan area dimana pertempuran dan konfrontasi militer yang sebenarnya dapat terjadi. Daerah ini tentu menjadi tantangan tersendiri di dalam membangun pertahanan berlapis. Oleh karena itu maka perlu upaya terukur dengan perencanaan pertempuran dengan mengidentifikasi dan menentukan strategi pertempuran di wilayah IKN. Ini melibatkan pemetaan area pertempuran, analisis situasi, penentuan target dan tujuan, serta pengembangan rencana operasional. Selain itu penempatan pasukan darat, udara, laut, dan siber di titik-titik strategis yang melindungi dan mempertahankan wilayah inti IKN. Pada konteks ini perlu dipahami mengingat dalam Daerah Pertempuran IKN, pertahanan terintegrasi antara berbagai cabang angkatan dan unit militer akan menjadi kunci. Untuk itu peran K4IPP perlu dimaksimalkan dengan membangun sistem Kodal sehingga mampu memastikan koordinasi terbangun sebagaimana yang diharapkan. Selain itu sebagai wujud pertahanan semesta maka Komcad dan Komduk juga perlu dilibatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga diharapkan akan mampu terbangun sebuah sistem pertahanan yang kuat.

5) Daerah Komunikasi. Daerah ini pada dasarnya merujuk pada infrastruktur dan sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung

koordinasi, pengiriman informasi, dan komunikasi antara pasukan militer di IKN. Namun belum baiknya sistem komunikasi yang terjalin menjadi persoalan yang perlu dipahami secara komprehensif. Karena sebagaimana diketahui Daerah Komunikasi penting untuk memastikan pertukaran informasi yang cepat dan akurat serta koordinasi yang efektif dalam menghadapi ancaman. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman militer yakni dengan menerapkan K4IPP melalui berbagai langkah strategis seperti: Menggunakan peralatan komunikasi seperti radio, satelit, jaringan data, dan perangkat komunikasi canggih lainnya; Melibatkan pengembangan jaringan komunikasi terpadu yang menghubungkan berbagai cabang angkatan dan unit militer di wilayah IKN sehingga memungkinkan pertukaran informasi *real-time* dan koordinasi operasional yang efisien; dan Meningkatkan perlindungan dan keamanan komunikasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah keamanan, seperti enkripsi data dan pengamanan jaringan, harus diimplementasikan untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah intersepsi atau manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk itu maka dalam ini unsur lain juga diperlukan seperti, BSSN yang berperan dalam melindungi infrastruktur komunikasi dan sistem informasi negara dari serangan siber yang dapat membahayakan Daerah Komunikasi di IKN, BNPB dalam mendukung upaya komunikasi dan koordinasi dalam situasi darurat akibat ancaman militer.

6) Daerah Belakang. Sebagaimana diketahui daerah ini merupakan area yang tidak langsung terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi tetap memiliki peran penting dalam mendukung upaya pertahanan. Kondisi ini menjadi tantangan di dalam membangun daerah belakang guna menghadapi ancaman militer di wilayah IKN yang kompleks. Dalam upaya menghadapi ancaman militer di wilayah IKN maka dapat dilakukan melalui kerangka K4IPP yang memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan sistem pertahanan berlapis melalui menerapkan Kodal sebagai bentuk membangun koordinasi taktis antara unit-unit pertahanan untuk melindungi daerah belakang dari serangan musuh. Adapun beberapa upaya yang

dilakukan, diantaranya: Menyediakan pasokan logistik yang diperlukan untuk mendukung pasukan di garis depan. Upaya ini melibatkan transportasi, penyimpanan, dan distribusi peralatan, persediaan makanan, amunisi, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh pasukan militer; dan Pemeliharaan serta perbaikan peralatan militer yang mencakup perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan yang rusak atau rusak di medan pertempuran. Fasilitas perbaikan dan perawatan, termasuk bengkel dan depot, berada di daerah belakang untuk mendukung keberlanjutan operasional pasukan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak diantaranya: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan dalam mengkoordinasikan upaya dalam hal logistik dan transportasi di daerah belakang; BMKG dapat memberikan informasi cuaca dan gempa bumi yang penting untuk operasi logistik, sementara BNPT dapat berperan dalam menjaga keamanan di daerah belakang terhadap ancaman terorisme.

Mengacu uraian diatas maka dapat dipahami bahwa konsep K4IPP sangat penting di dalam menghadapi ancaman militer. Untuk itu perlu dibangun interoperabilitas dalam K4IPP yang memungkinkan berbagai komponen bekerja bersama secara efisien dan efektif. Melalui interoperabilitas memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan lancar antara berbagai komponen K4IPP. Informasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dan respon yang cepat terhadap situasi yang berkembang. Disamping itu juga interoperabilitas juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam membangun pertahanan yang kuat di wilayah IKN.

b. Membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman non militer diwilayah IKN.

Dalam konteks ancaman non-militer, K4IPP tetap memiliki peran penting dalam mendukung keamanan dan stabilitas suatu negara. Meskipun tidak melibatkan konflik bersenjata, ancaman non-militer seperti terorisme, kejahatan lintas negara, serangan siber, bencana alam dan lain sebagainya yang dapat

memiliki dampak serius terhadap kedaulatan dan kestabilan negara. Peran K4IPP secara umum dalam menghadapi ancaman non militer dapat terlihat dalam Kodal yang berkenaan dengan koordinasi antarlembaga, pengaturan tindakan untuk menangani ancaman serta pengendalian dan pengawasan operasional yang memungkinkan pengaturan tindakan penanggulangan terhadap ancaman non-militer; penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung analisis, pemantauan, dan pelacakan ancaman non-militer; pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi intelijen yang relevan untuk mendukung penanggulangan ancaman serta lain sebagainya.

Terkait dengan ancaman non militer terutama di wilayah IKN maka diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan terukur sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap keberlangsungan pembangunan ibukota negara tersebut. Mengacu pada konsep K4IPP yang berbentuk *smart defense* dan satuan penindakan maka upaya menghadapi ancaman non-militer dapat diuraikan dengan mendasarkan pada pertahanan berlapis sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- 1) Zona Penyangga. Sebagaimana dipahami zona penyangga dirancang untuk melindungi wilayah inti IKN dari ancaman non-militer seperti konflik sosial, terorisme, kejahatan lintas batas, atau ancaman non-militer lainnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam kerangka K4IPP yakni dengan membangun sistem Kodal untuk melindungi wilayah dari ancaman non-militer sebagai wujud mendeteksi dan memantau aktivitas di zona penyangga. Hal ini tentu sangat membantu dalam memantau pergerakan ilegal, memonitor batas wilayah, dan memberikan data visual yang mendukung tindakan keamanan sehingga hal ini dapat menjadi bahan di dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh Kemendagri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, mencegah konflik sosial, dan menangani ancaman tersebut di wilayah IKN; Kemenkopolhukam berperan dalam pembentukan Zona Penyangga dan mengoordinasikan upaya antarlembaga dalam menghadapi ancaman non-militer di IKN; BIN memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menghadapi ancaman non-militer, termasuk terorisme, kejahatan

transnasional, dan konflik sosial di wilayah IKN; Polri memiliki peran untuk melaksanakan tugas kepolisian, mencegah dan menangani tindak kejahatan, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat di Zona Penyangga; BNPT memiliki andil di dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi ancaman terorisme di Zona Penyangga IKN dengan melakukan kerja sama dengan aparat keamanan, mengadakan operasi pencegahan, serta memberikan edukasi dan pelatihan terkait terorisme; dan Kemenkumham bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang melibatkan hak asasi manusia dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Dalam konteks ini maka yang menjadi *leading sector* ialah K/L terkait, namun TNI memiliki sifat sebagai perbantuan dalam memperkuat pertahanan negara.

2) Zona Pertahanan Udara. Zona ini memiliki peran penting dalam melindungi wilayah udara IKN dari ancaman seperti serangan udara teroris, pelanggaran udara, atau kegiatan ilegal lainnya. Dalam konteks tersebut, maka K4IPP memiliki andil di dalam memperkuat deteksi atas ancaman non militer yang dapat mengganggu pertahanan udara. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan menghadapi ancaman non militer di wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu: Kemhan memiliki peran utama dalam mengatur dan mengkoordinasikan upaya pertahanan udara di wilayah IKN. Kementerian tersebut bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan strategi pertahanan udara, serta menyediakan dukungan logistik dan peralatan yang diperlukan untuk melindungi wilayah udara IKN dari ancaman non-militer; TNI AU melaksanakan pengawasan udara, pemantauan radar, dan patroli udara untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman non-militer, seperti serangan teroris atau pelanggaran udara; Kemenkopolhukam dapat terlibat dalam pengaturan kerjasama antara lembaga terkait dan koordinasi tindakan untuk melindungi wilayah udara IKN dari ancaman non-militer; BNPT melakukan kerja sama dengan aparat keamanan, termasuk TNI Angkatan Udara, dalam melaksanakan operasi pencegahan terorisme dan menjaga keamanan Zona Pertahanan Udara; Kemenhub dapat bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan pengawasan udara dan mengkoordinasikan operasi penerbangan yang aman di Zona Pertahanan

Udara; dan LAPAN dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan teknologi penerbangan dan antariksa di Indonesia sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan teknis dan informasi yang relevan bagi pertahanan udara, termasuk dalam menghadapi ancaman non-militer di wilayah IKN. Peran TNI dalam zona ini juga dibutuhkan sesuai dengan tupoksinya dengan mengacu pada regulasi atau kebijakan yang ada.

3) Zona Perlawanan. Secara umum zona perlawanan cenderung merujuk pada zona-zona pertahanan yang ditetapkan dalam menghadapi ancaman militer konvensional. Namun demikian jika mengacu kondisi yang dinamis zona ini juga perlu dipersiapkan di dalam menghadapi pertahanan non militer. Dalam konteks ini maka K4IPP dapat diterapkan dengan melakukan deteksi atas ancaman yang ada terutama non militer melalui radar, sensor, dan penginderaan jauh dalam mendukung terbangunnya pertahanan negara yang kuat. Bentuk penerapan atas zona ini dapat dinarasikan sebagai berikut: Kemenkopolhukam memiliki peran penting dalam merancang kebijakan, koordinasi, dan pengawasan terkait keamanan nasional. Kementerian tersebut berperan dalam koordinasi antara lembaga terkait dalam menghadapi ancaman non-militer di wilayah IKN; Polri memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum dan keamanan di wilayah IKN; BIN berkontribusi dalam menyediakan analisis dan informasi strategis kepada pemerintah terkait ancaman non-militer yang dapat mempengaruhi keamanan IKN; Kominfo bertanggung jawab dalam mengatasi ancaman siber, melindungi data sensitif, serta memastikan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; Kemen PPA berfokus pada perlindungan perempuan dan anak-anak dari ancaman non-militer seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak; dan Kementerian ini berperan dalam menyediakan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan bagi korban ancaman non-militer di wilayah IKN. Untuk TNI sebagai komponen utama, sifatnya hanya perbantuan serta mengacu pada tugas-tugasnya yang tertuang pada OMSP.

4) Daerah Pertempuran. Dalam konteks penanganan ancaman non-militer, maka daerah pertempuran perlu dipersiapkan secara baik salah

satunya dengan mengacu pada konsep K4IPP yakni merencanakan dan mengoordinasikan operasi keamanan di daerah pertempuran, memastikan pertukaran informasi yang efektif, memantau situasi di lapangan untuk melawan ancaman non-militer, mendeteksi dan mengidentifikasi kegiatan yang mencurigakan serta memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Namun demikian dalam daerah pertempuran terutama menghadapi ancaman non militer masih terkendala belum baiknya koordinasi serta penggunaan sarana prasarana pendukung sehingga penerapan K4IPP belum optimal. Terkait dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai contoh Polri memiliki peran utama dalam menangani ancaman non-militer di wilayah IKN. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di IKN. Polri akan berperan dalam penanganan situasi darurat, penegakan hukum, dan penggerebekan terhadap kelompok atau individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau ancaman non-militer lainnya; BNPT bekerja sama dengan Polri, TNI, dan lembaga intelijen untuk mengumpulkan informasi intelijen, menyelenggarakan operasi khusus, dan melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan terorisme; TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut dapat memberikan dukungan dalam bentuk pengamanan infrastruktur vital, pemberian bantuan logistik, atau dukungan dalam situasi darurat jika diperlukan; dan LINMAS sebagai organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di tingkat lokal. LINMAS dapat berperan dalam membantu penegakan hukum, pengawasan wilayah, dan memberikan informasi kepada aparat keamanan mengenai kegiatan yang mencurigakan atau ancaman non-militer.

5) Daerah Komunikasi. Daerah komunikasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi, informasi, dan respons terhadap ancaman tersebut dengan implementasi K4IPP yakni melalui memperkuat sistem komando dan kendali, deteksi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun beberapa kendala yang dihadapi seperti ketahanan jaringan komunikasi; potensi peretasan atau penyadapan komunikasi;

interoperabilitas antara berbagai sistem dan teknologi dalam K4IPP terkadang dapat menjadi kendala. Jika sistem yang digunakan oleh berbagai komponen K4IPP tidak kompatibel atau tidak dapat saling berintegrasi, maka akan sulit untuk berbagi informasi secara efektif dan merespons ancaman non-militer dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan interoperabilitas yang baik antara sistem-sistem yang digunakan dalam K4IPP; dan terbatasnya anggaran, peralatan yang kurang memadai, atau kekurangan personel yang terampil. Perihal kondisi tersebut, maka dalam menghadapi ancaman non-militer di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) beberapa pihak dapat melakukan upaya-upayanya, sebagai contoh menghadapi siber maka Kominfo perlu memastikan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang andal dan aman, serta menyediakan pengawasan terhadap penggunaan komunikasi dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti penyebaran hoaks, propaganda, atau serangan siber; BSSN berkoordinasi dengan Kominfo dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat pertahanan siber dan memitigasi serangan siber yang dapat mengancam stabilitas daerah komunikasi. Lembaga Sandi Negara berperan dalam melindungi informasi sensitif dan menjaga kerahasiaan komunikasi pemerintah di wilayah IKN serta berkontribusi dalam pencegahan ancaman non-militer yang berhubungan dengan penggunaan informasi sensitif; Polri dapat memantau dan melakukan penindakan terhadap kegiatan komunikasi yang melanggar hukum, termasuk penyebaran informasi palsu, provokasi, atau propaganda yang dapat memicu ketegangan sosial; dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait lainnya penting untuk memastikan informasi yang akurat, respons yang cepat, dan perlindungan terhadap infrastruktur komunikasi yang vital di wilayah IKN dalam menghadapi ancaman non-militer. Sedangkan untuk TNI memiliki peran strategis dalam perbantuan atas ancaman yang dihadapi.

6) Daerah Belakang. Daerah ini umumnya merujuk pada area di belakang garis depan atau area pendukung yang berfungsi untuk mendukung operasi militer melalui penguatan konsep K4IPP. Namun, dalam konteks menghadapi ancaman non-militer di IKN terutama pada konteks K4IPP

masih menghadapi masalah seperti: kelemahan infrastruktur, belum optimalnya koordinasi, kurangnya akses ke data dan informasi, dan pemahaman tentang ancaman non-militer atau kurangnya pelatihan dalam menggunakan teknologi dan sistem yang terlibat dalam K4IPP dapat mempengaruhi efektivitas respons terhadap ancaman tersebut. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: Kemendagri berperan dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, penegakan hukum, dan penanganan keadaan darurat jika diperlukan; Kemenko PMK berperan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi ancaman non-militer; Kemenkes menyediakan layanan kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dan merespons situasi kesehatan darurat yang dapat timbul akibat ancaman non-militer; Kemensos memberikan perlindungan sosial, pemulihan, dan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak; BNPB berperan dalam memberikan respons cepat, evakuasi, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana akibat ancaman non-militer seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran; dan BPPT dapat berperan dalam menghadapi ancaman non-militer di wilayah IKN melalui penerapan teknologi yang inovatif sehingga mampu membantu dalam pemantauan, mitigasi, dan pengendalian ancaman non-militer dengan menggunakan teknologi canggih. Adapun untuk komponen utama (TNI) memiliki andil dalam perbantuan guna mendukung di dalam menghadapi ancaman yang kompleks.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa dalam menghadapi ancaman non militer perlu memedomani K4IPP karena dipandang sangat penting dalam menanggulangi ancaman non-militer yang terjadi. Dalam konteks ancaman non-militer, seperti bencana alam, terorisme, atau kejahatan transnasional, interoperabilitas dalam K4IPP memungkinkan sinergi dan kolaborasi yang diperlukan untuk menghadapi ancaman tersebut secara efektif. Hal ini membantu meningkatkan respons yang cepat, koordinasi yang baik, dan pemahaman situasional yang lebih baik, sehingga memperkuat kemampuan pihak yang terlibat untuk menanggulangi ancaman non-militer secara efisien dan efektif.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.

Berdasarkan uraian perihal sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai *Center of Gravity* (CoG) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu memperhatikan berbagai aspek diantaranya dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya hingga pertahanan. Unsur pertahanan merupakan sesuatu yang perlu dikelola dengan baik dan diperkuat dalam upaya menjaga keberlangsungan negara atas kompleksitas ancaman yang berkembang. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah perihal pembangunan IKN mengusung pertahanan semesta (*total defence*) yakni sebuah sistem pertahanan yang berusaha mengoptimalkan seluruh komponen yang ada baik komponen utama, cadangan dan pendukung melalui jalinan kerjasama yang baik sehingga mampu menghadapi berbagai gangguan yang dapat mengganggu pembangunan IKN. Namun dalam membangun sistem pertahanan tersebut masih menyisahkan berbagai persoalan seperti belum baiknya SDM dalam pembangunan pertahanan, terbatasnya sarana prasarana pendukung, belum baiknya kerjasama antar berbagai komponen serta belum baiknya aturan dalam mendukung sistem pertahanan semesta.
- b. Sistem pertahanan semesta (Sishanta) di IKN pada dasarnya merupakan bagian integral sistem pertahanan negara (Sishanneg) dalam menghadapi berbagai ancaman yakni militer, non militer dan hibrida dimana apabila ancaman tersebut tidak mampu diantisipasi dengan baik maka akan berdampak sistemik pembangunan IKN. Namun pada konteks ini ancaman difokuskan pada ancaman militer dan non militer. Ancaman militer terbagi atas sengketa perbatasan, serangan angkatan bersenjata dari negara lain, ancaman kedaulatan atas wilayah udara, spionase, invasi dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman non militer mencakup konflik SARA, terorisme dan radikalisme, hoaks, kejahatan transnasional, bencana alam dan

sebagainya. Kesemua ancaman tersebut perlu dipahami dengan baik agar mampu diterapkan penanganan yang sesuai tentunya dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang. Disamping itu pembangunan sistem pertahanan di IKN juga perlu memperhatikan berbagai regulasi atau kebijakan yang mengaturnya sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan atau kapasitasnya. Adapun pembangunan sistem pertahanan di IKN juga perlu dilihat secara komprehensif termasuk lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional (Astagatra) yang turut mempengaruhi pembangunan IKN baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan demikian mampu mendapatkan gambaran yang utuh di dalam mewujudkan sistem pertahanan di IKN yang diharapkan.

c. Pembangunan pertahanan di IKN dilakukan dengan beberapa alasan yaitu: IKN merupakan wilayah yang dijadikan berbagai aktivitas seperti pusat pemerintahan, keuangan, simbol atau identitas negara serta lain sebagainya, objek vital negara sehingga perlu didukung dengan kesiapan sistem pertahanan baik yang bersifat militer maupun non militer dan kompleksitas ancaman yang berkembang. Untuk itu pengerahan unsur TNI dalam tugasnya baik OMP maupun OMSP menjadi sangat diperlukan dengan mengacu pada strategi militer yakni penangkalan, penindakan dan pemulihan. Selain itu komponen-komponen lainnya juga perlu dilibatkan mengingat ancaman yang ada di IKN tidak hanya terbatas militer. Oleh sebab itu keterpaduan antar unsur-unsur terkait menjadi perlu dikedepankan sebagaimana diterangkan dalam konsep Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP). Konsep ini memiliki peran strategis di dalam komando dan kendali operasional dalam pembangunan postur pertahanan negara guna menghadapi berbagai potensi ancaman dimana hal tersebut sejalan dengan sistem pertahanan berlapis (Zona Penyangga, Zona Pertahanan Udara, Zona Perlawanan, Daerah Pertempuran, Daerah Komunikasi dan Daerah Belakang) yang menekankan keterpaduan antara berbagai komponen sehingga terbangun sistem pertahanan yang kuat. Dengan demikian berbagai komponen yang ada

mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksinya sehingga akan terbangun keselarasan dalam mewujudkan pertahanan semesta.

17. Rekomendasi

Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan teori, tinjauan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi dipandang dapat dilakukan di terkait membangun sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman di wilayah IKN, yaitu:

- a. Kemhan bersama dengan TNI perlu membentuk Pola Sistem Nasional Pertahanan Semesta yang secara terpadu dan terarah mengatur implementasi dan operasional penerapan sistem pertahanan semesta yang melibatkan dan mampu menggerakkan semua komponen pertahanan negara (komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung) dalam upaya menangkal perkembangan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia terutama di wilayah IKN. Langkah strategis ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kerangka K4IPP agar menekankan pada integrasi, responsif, efisien, dan efektif menghadapi ancaman-ancaman yang ada baik militer maupun non militer. Hal ini menjadi diperlukan agar penanganan atas kompleksitas ancaman mampu dilakukan secara tepat dan cepat sehingga pembangunan IKN dapat berjalan sesuai harapan.
- b. Lembaga Kepolisian dan TNI perlu melibatkan masyarakat dalam program pengawasan dan pemantauan keamanan di wilayah IKN. Melalui program penggalangan informasi dan program keamanan lingkungan, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan potensi ancaman yang dapat membahayakan wilayah IKN.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu meningkatkan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah IKN guna melindungi dari ancaman

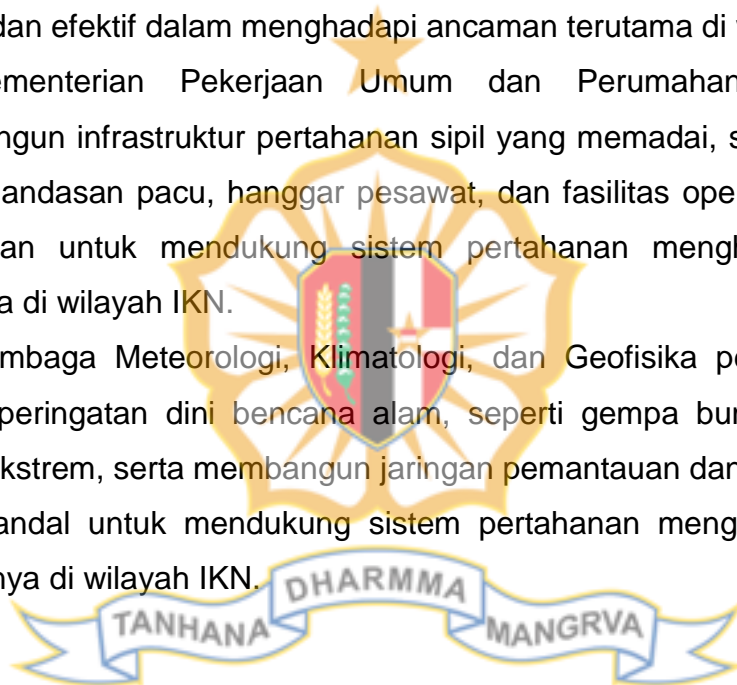
siber. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai bentuk upaya untuk melindungi infrastruktur dan data kritis dalam memperkuat sistem pertahanan menghadapi kompleksitas ancaman.

d. BIN perlu memperkuat perannya dalam mengumpulkan informasi intelijen terkait ancaman terutama di wilayah IKN. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan dan mengambil tindakan guna menghadapi potensi ancaman yang berkembang.

e. Kementerian Riset dan Teknologi perlu mendorong inovasi di sektor pertahanan dengan mendorong kolaborasi antara lembaga riset, universitas, dan industri pertahanan. Inovasi dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menghadapi ancaman terutama di wilayah IKN.

f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membangun infrastruktur pertahanan sipil yang memadai, seperti pangkalan militer, landasan pacu, hanggar pesawat, dan fasilitas operasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung sistem pertahanan menghadapi ancaman terutama di wilayah IKN.

g. Lembaga Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu memperkuat sistem peringatan dini bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrem, serta membangun jaringan pemantauan dan pemodelan iklim yang handal untuk mendukung sistem pertahanan menghadapi ancaman khususnya di wilayah IKN.



Mengetahui
Tutor Taskap PPRA LXV,

Jakarta, Agustus 2023
Peserta PPRA LXV,

Laksda TNI (Purn) Prasetya Nugraha

Edi Saputra

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. (Jakarta: Bappenas, 2021).
- Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Jakarta: Bappenas.
- Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/penduduk-indonesia-masih-terkonsentrasi-di-pulau-jawa> diakses pada 2 April 2023 pukul 12.30 WIB.
- Fisher, R.E. et. al, Constructing a Resilience Index for the Enhanced Critical Infrastructure Protection Program, Argonne national Laboratory, AN/DIS-10-9, Agustus 2010.
- Harwono, Setyo. Peran Pendidikan Keluarga dalam Membentuk Perilaku Bela Negara Remaja di Jakarta dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Prosiding Seminar. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhan, 2015.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/survei-cigi-facebook-medsos-yang-banyak-digunakan-untuk-menyebar-hoaks> diakses 1 April 2023 pukul 12.40 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/masyarakat-paling-banyak-mengakses-informasi-dari-media-sosial>, diakses 1 April 2023 pukul 23.31 WIB.
- <https://katadata.co.id/agustiyan/finansial/610b9dc3601f5/pertumbuhan-ekonomi-papua-maluku-tertinggi-capai-8-75-pada-kuartal-2>, diakses 1 April 2023 pukul 11.00 WIB.
- <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/610ce05b8eba8/daftar-kekuatan-militer-ri-yang-berada-di-peringkat-16-dunia>, diakses 3 Juni 2023 pukul 19.21 WIB.
- [https://www.aa.com.tr/id/dunia/china-khawatir-dengan-anggaran-pertahanan-terbaru-jepang/2773803#:~:text=Rancangan%20anggaran%20untuk%20tahun%202023,triliun%20yen%20\(USD865%20miliar\)](https://www.aa.com.tr/id/dunia/china-khawatir-dengan-anggaran-pertahanan-terbaru-jepang/2773803#:~:text=Rancangan%20anggaran%20untuk%20tahun%202023,triliun%20yen%20(USD865%20miliar)), diakses 4 April 2023 pukul 21.30 WIB.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220109112443-4-305772/ancaman-serius-hantui-ibukota-baru-ri-serangan-rudal-china>, diakses 7 April 2023 pukul 23.13 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203131517-4-312608/bukan-perang-terbuka-ini-ancaman-serius-ri-di-ikn-nusantara>, diakses 7 April 2023 pukul 21.45 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200701231153-113-519804/australia-naikkan-anggaran-pertahanan-jadi-us-186-miliar>, diakses 4 April 20.21 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230408083744-113-935022/siaga-tempur-china-gelar-latihan-militer-di-selat-taiwan>, diakses 8 April 2023 pukul 08.23 WIB.

<https://www.kompas.com/global/read/2022/03/23/210000170/5-dampak-perang-rusia-ukraina-yang-mengubrak-abrik-ekonomi-global?page=all>, diakses 12 April 2023 pukul 06.30 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 1 April 2023 pukul 20.31 WIB.

https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/22/sejarah-ibu-kota-negara-simbol-representasi-bangsa-yang-cenderung-elitis?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink, diakses 6 Maret 2023 pukul 15.00 WIB. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

Kementerian Pertahanan. Paparan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan: Konsep Pembangunan Sistem Pertahanan IKN. (Jakarta: Kemhan, 2022).

Lemhannas RI. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. (Jakarta: Lemhannas, 2023).

Lemhannas RI. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. (Jakarta: Lemhannas, 2023).

Mukhtar. *Militer dan Demokrasi*. (Malang: Intrans Publishing, 2017).

Mulyani, Sri. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. (Bandung: Abdi SisteMatika, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Snyder, Craig A. *Contemporary Security and Strategy*. (Abingdon: Routledge, 1999).

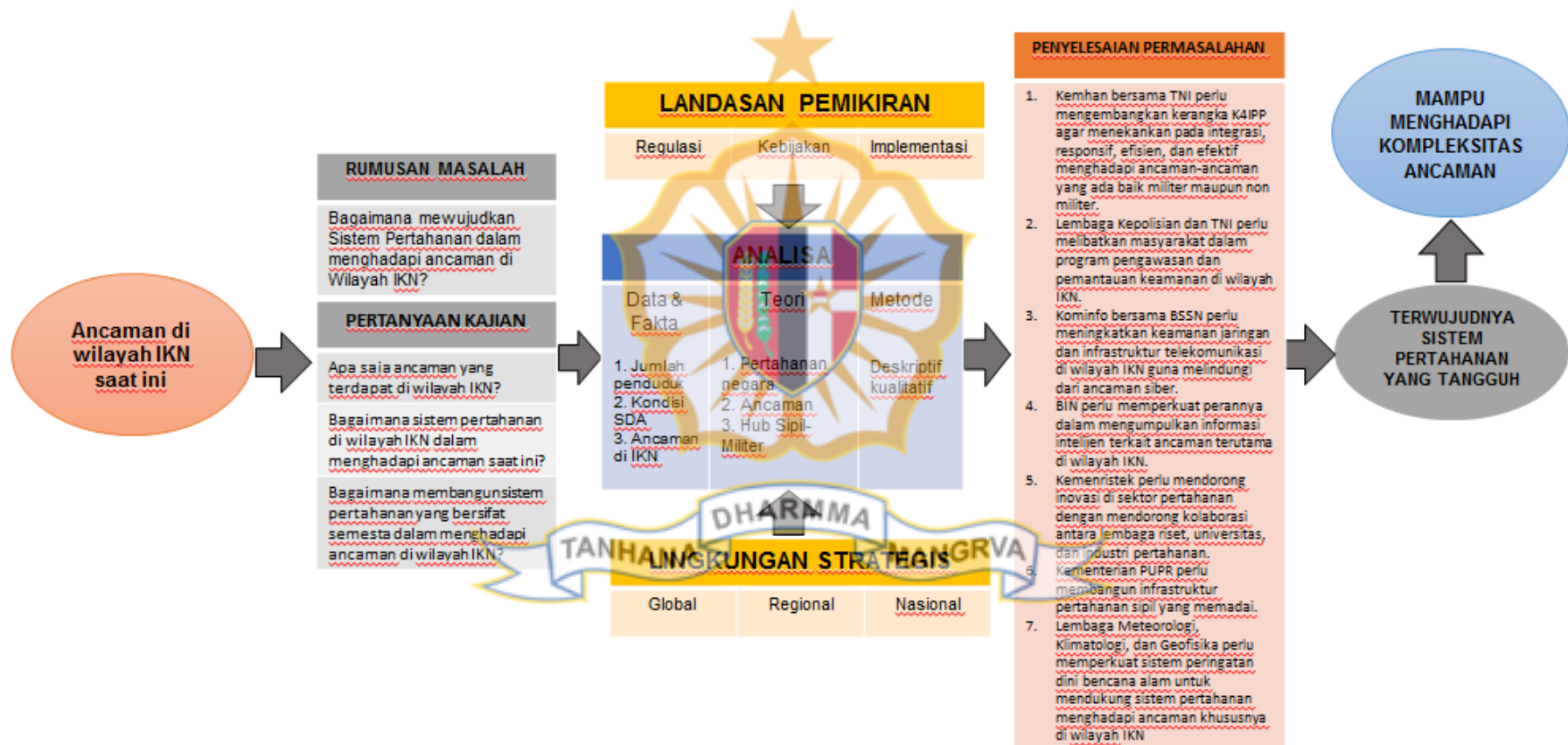
Tippe, Syarifudin. Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi. (Jakarta: Salemba Humanika, 2016).

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.



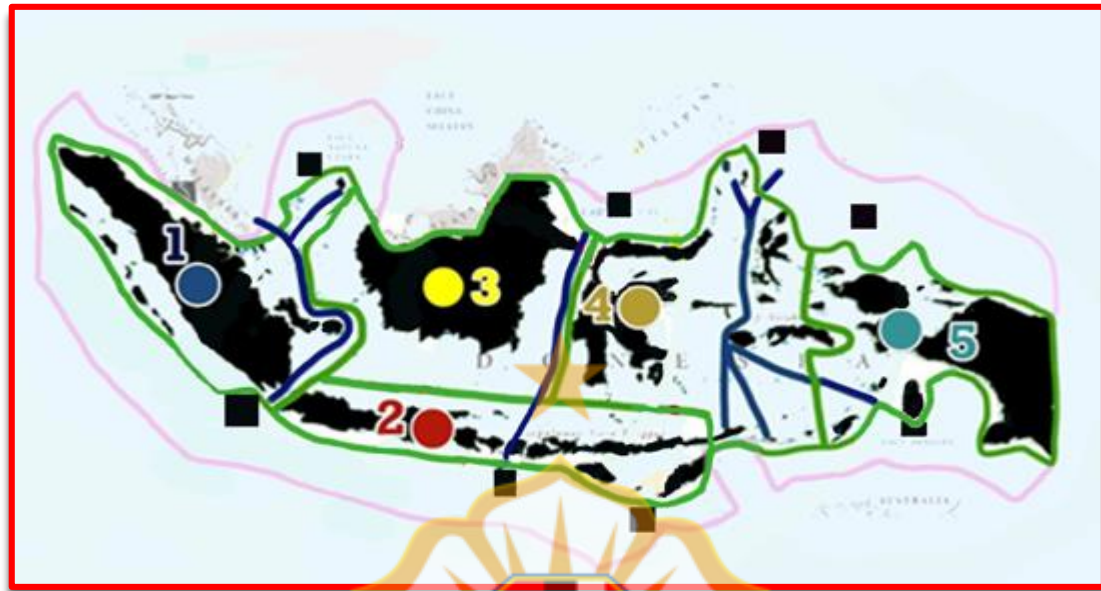
Lampiran 1: Alur Pikir

SISTEM PERTAHANAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI WILAYAH IKN



Lampiran 2: Kelengkapan Data

Gambar 1: Pertahanan Pulau-Pulau Besar Dan Gugusan Pulau Kecil Yang Bersifat Strategis



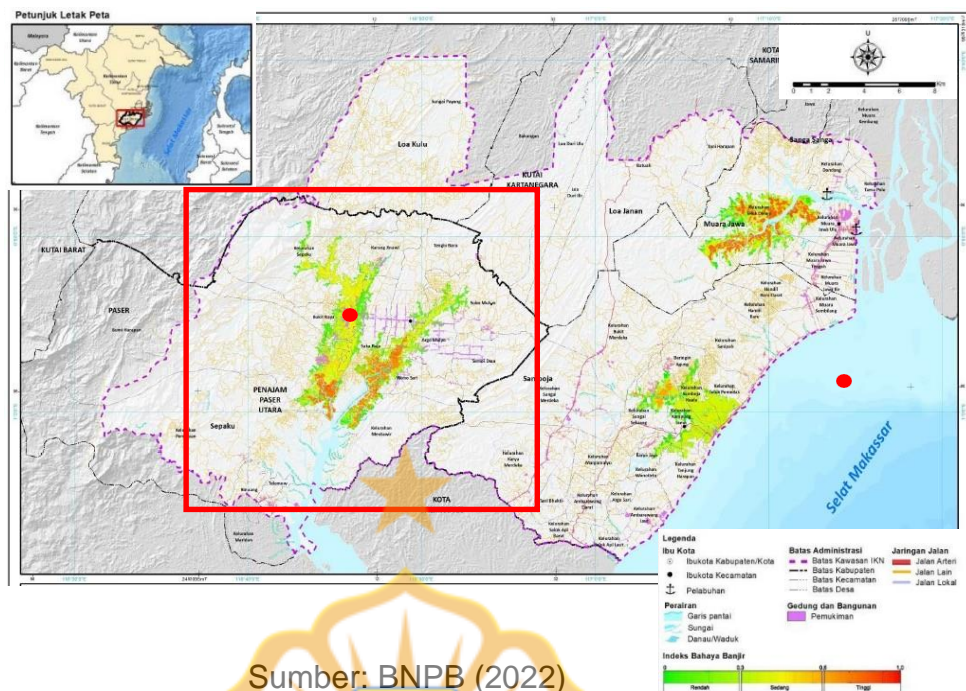
Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 2: Konsep Pertahanan IKN Aspek Udara



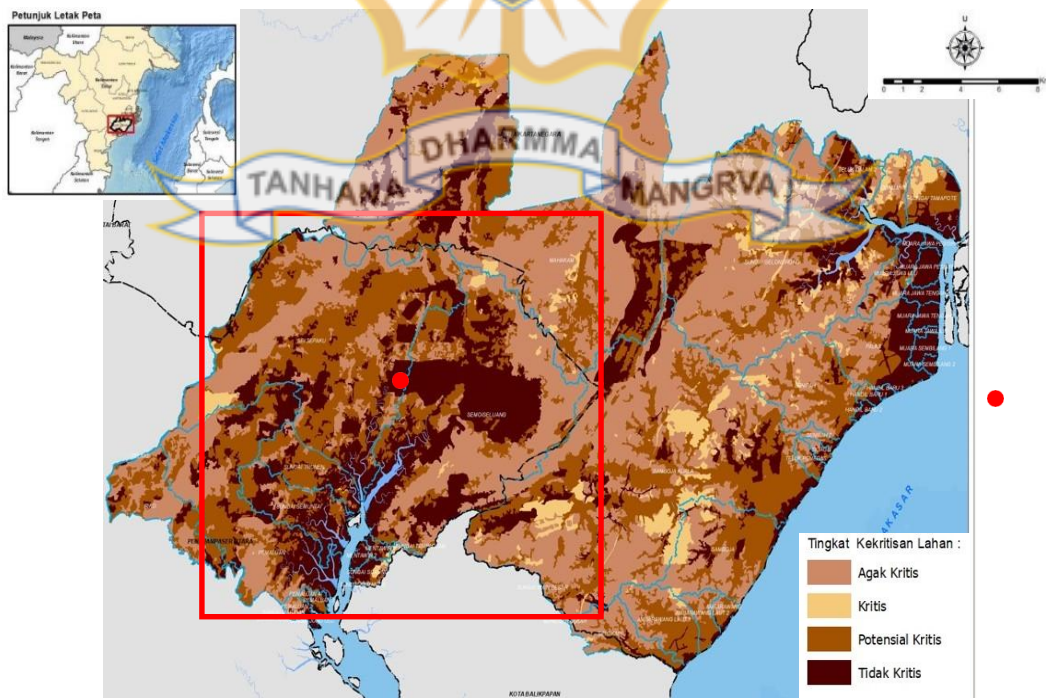
Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 3. Peta Risiko Bencana Kawasan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 keluaran BNPB



Sumber: BNPB (2022)

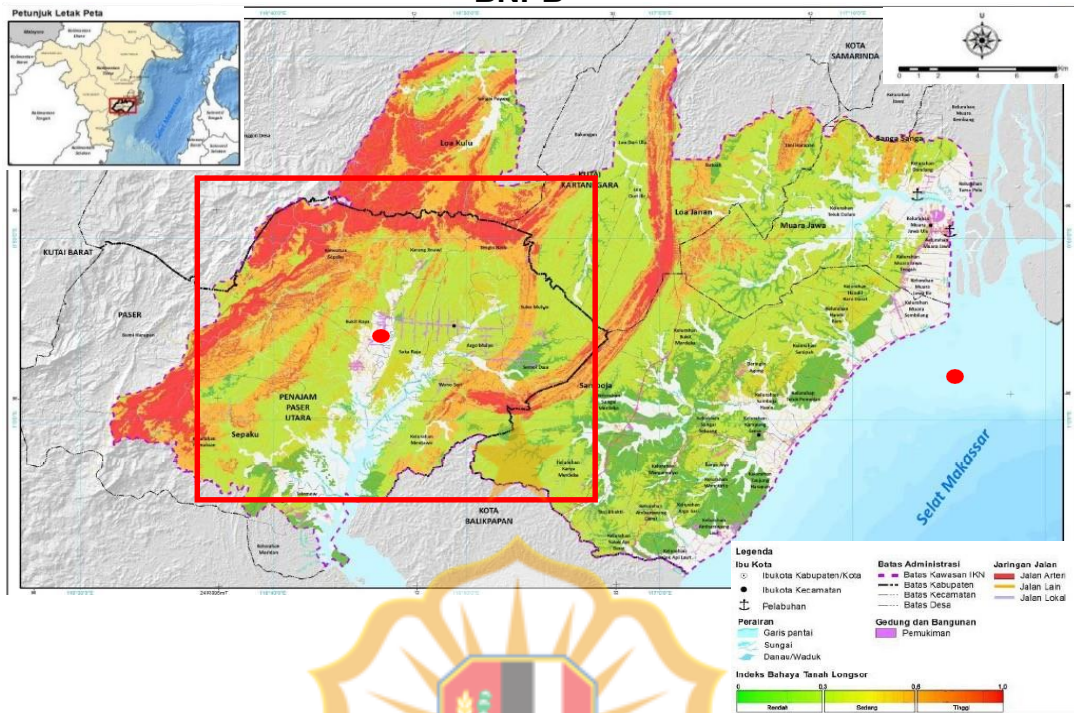
Gambar 4. Peta Lahan Kritis di Kawasan IKN Oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Berau



Sumber: BNPB (2022)

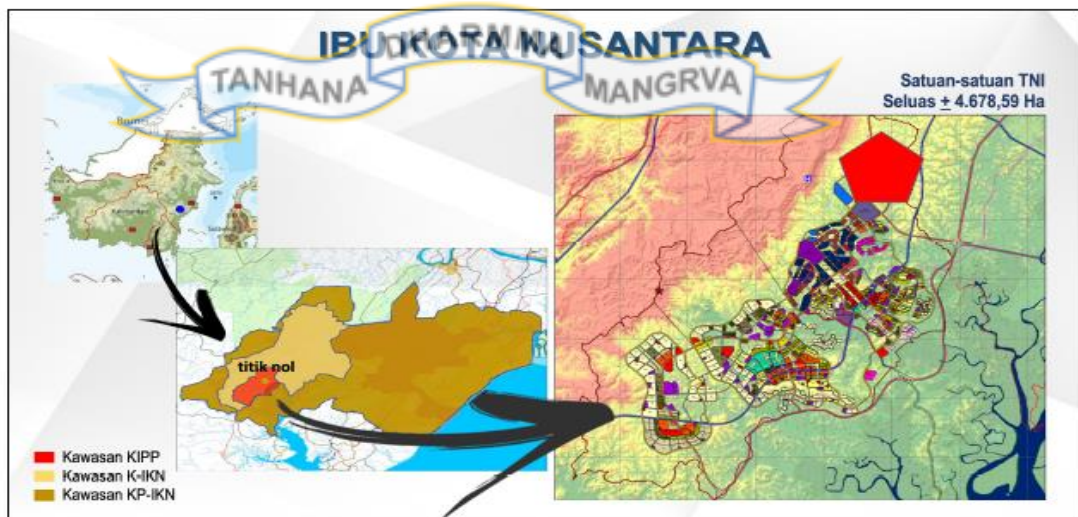
Gambar 5 : Peta Bahaya Longsor IKN Dalam Album Peta Risiko Bencana Kawasan IKN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 keluaran

BNPB



Sumber: BNPB (2022)

Gambar 6: Zonasi Ibu Kota Negara



Sumber: Srenum TNI, 2022

The diagram illustrates the various maritime zones and the corresponding rights of a coastal state. It is divided into several colored sections representing different zones:

- Kedaulatan (Sovereignty):** Represented by a blue section on the left, covering the land and the territorial sea.
- Hak Berdaulat (Sovereign Rights):** Represented by a green section, covering the Exclusive Economic Zone (ZEE) and the Continental Shelf (Landas Kontinen).
- Laut Bebas (High Seas):** Represented by a light blue section on the right, where no single state has sovereignty.

Key maritime zones and their boundaries are marked:

- Perairan Pedalaman (Internal Waters):** The area closest to the land.
- Daerah Pangkal Pertahanan (Defence Base Area):** A specific area within the internal waters, marked with a red arrow.
- Mandala Pertahanan Dalam (Inner Defence Zone):** A zone extending from the coast, marked with a yellow arrow.
- Mandala Pertahanan Utama (Main Defence Zone):** A larger zone extending further, marked with a yellow arrow.
- Mandala Pertahanan Luar (Outer Defence Zone):** The furthest defence zone, marked with a yellow arrow.
- LT (12 M):** The Territorial Sea limit, marked with a green arrow.
- ZT (24 M):** The Zone of Traversal limit, marked with a green arrow.
- ZEE (200 M):** The Exclusive Economic Zone limit, marked with a blue arrow.
- Landas Kontinen (PSL 76 - UNCLOS):** The Continental Shelf, marked with a red arrow.
- The Area/Kawasan (BAB XI - UNCLOS):** The Area, marked with a red arrow.

Gambar 8. AREA DENIAL (A2/AD)



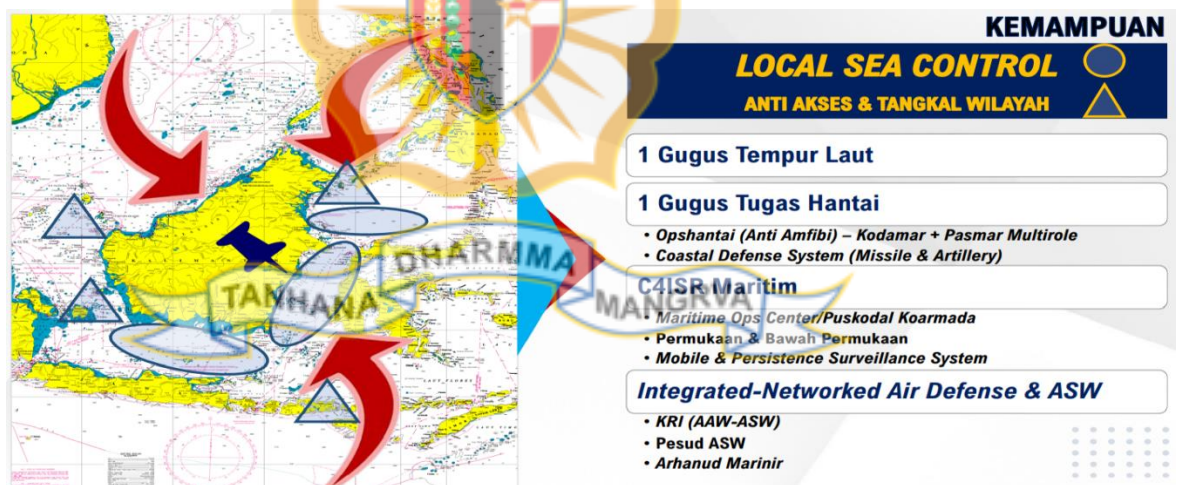
Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 9. Konsep Gelar Satuan TNI AD



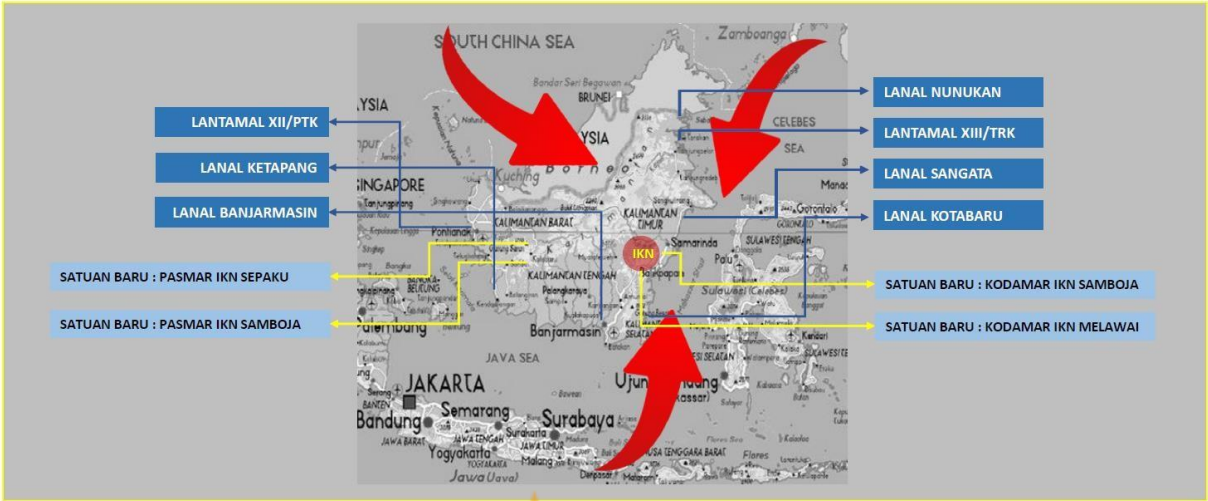
Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 10. Konsep Pertahanan IKN Aspek Laut



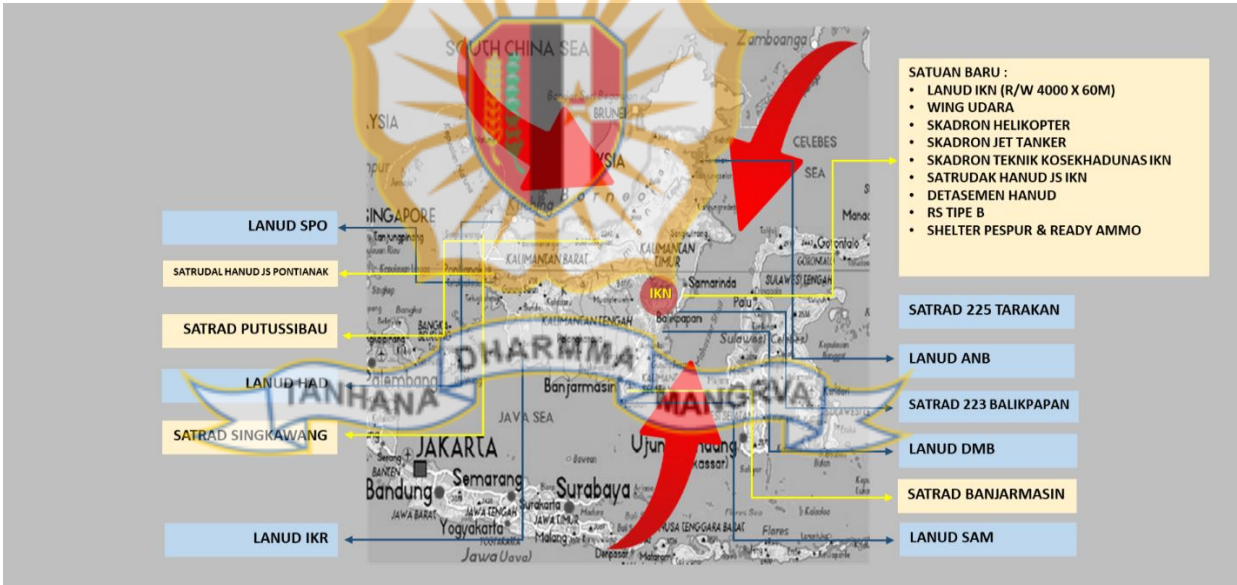
Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 11. Konsep Gelar Satuan TNI AL



Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 12. Konsep Gelar Satuan TNI AU



Sumber: Kemhan (2023)

Gambar 13. Geografis di Wilayah IKN



Sumber: Kemhan (2023)

Tabel 1: Satuan TNI AD

| KODAM VI/MLW (KALTIM-KALTARA) | | KODAM XII/TPR (KALTENG) | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| SATUAN | STATUS | SATUAN | STATUS |
| MAKODAM (BALIKPAPAN) | EXISTING | KOREM 102/PJG (PALANGKARAYA) | EXISTING |
| KOREM 091/ASN (SAMARINDA) | EXISTING | YONIF 631 (PALANGKARAYA) | EXISTING |
| BRIGIF 24 MABRIGIF (BULUNGAN) | EXISTING | Ki-C YONZIPUR 6 | EXISTING |
| YONIF RAIDER 600 (BALIKPAPAN) | EXISTING | SATUAN | STATUS |
| YONIF 611 (KUKAR) | EXISTING | MABRIGIF | BARU |
| YONKAV 13 (KUKAR) | EXISTING | 1 YONIF | BARU |
| YONZIPUR 17 (SAMARINDA) | EXISTING | 1 YONIF | BARU |
| YONARMED 18 (BERAU) | EXISTING | 1 YONARMED | BARU |
| 1 YONARHANUD (BONTANG) | EXISTING | 1 YONARHANUD | BARU |
| 1 YONIF (PENAJAM) | BARU | | |
| 1 YONIF (MAHAKAM HULU) | BARU | | |
| 1 YONIF (KUBAR) | BARU | | |
| 1 YONKAV (KALTARA) | BARU | | |
| 1 MENARMED MAMEN (BULUNGAN) | BARU | | |
| 1 YONARMED (MALINAU) | BARU | | |
| 1 YONARMED (KUBAR) | BARU | | |
| 1 MENARHANUD MAMEN (BULUNGAN) | BARU | | |
| 1 YONARHANUD (BALIKPAPAN) | BARU | | |
| 1 YONARHANUD (NUNUKAN) | BARU | | |

Sumber: Kemhan (2023)

Tabel 2: Sistem Pertahanan dalam menghadapi Ancaman Militer dan Non Militer di wilayah IKN

| No | Ancaman | Zona Pertahanan Berlapis | Peran K4IPP | Pengerahan Komponen Pertahanan | Ket |
|----|---------|--------------------------|--|---|-------------|
| 1 | Militer | Zona Penyangga | K4IPP memiliki peran strategis di dalam mendeteksi dan peringatan dini terhadap ancaman melalui satelit dan radar yang tergelar di wilayah IKN, memberikan informasi ke Puskodal operasi TNI; menganalisa ancaman militer dalam Puskodal operasi serta pengambilan keputusan menghadapi ancaman oleh Panglima TNI. | TNI (AU dan AL) sebagai komponen utama pertahanan negara sebagai kekuatan penangkal di zona penyangga. Untuk itu maka diperlukan peningkatan kesiapan komponen utama lainnya seperti TNI AD yang didukung komponen cadangan dan pendukung | Penangkalan |
| | | Zona Pertahanan Udara | K4IPP melalui sistem radar dan sensor lainnya yang dapat mendeteksi pesawat terbang, rudal, atau ancaman udara lainnya; mengidentifikasi atas potensi ancaman melalui pemanfaatan teknologi dan sistem komunikasi yang memadai sehingga mampu mendapatkan informasi yang akurat untuk menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. | Komponen utama pertahanan menjadi <i>leading sector</i> yang didukung dengan K/L lain seperti BIN dan LAPAN sehingga mampu memperkuat sistem pertahanan. | Penangkalan |
| | | Zona Perlawanan | K4IPP merupakan elemen | TNI sebagai <i>leading</i> | Penindakan |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|-------------|
| | | | penting dalam Kodal, membangun komunikasi, pengumpulan informasi, pengintaian dan lain sebagainya dimana hal tersebut sangat diperlukan guna mendukung pengambilan keputusan. | sector dalam menghadapi ancaman militer dengan didukung berbagai komponen lain seperti komponen cadangan dan pendukung. | |
| | Daerah Pertempuran | | K4IPP berperan dalam membangun sistem Kodal sehingga mampu memastikan koordinasi terbangun sehingga mampu menghadapi ancaman militer. | TNI merupakan elemen penting dalam zona ini. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan guna mendukung terwujudnya pertahanan yang kuat termasuk dengan melibatkan komponen-komponen lainnya. | Penindakan |
| | Daerah Komunikasi | | Menggunakan perangkat pendukung seperti: radio, satelit, jaringan data, dan perangkat komunikasi canggih lainnya sehingga mampu mendukung jaringan komunikasi terpadu yang menghubungkan berbagai cabang angkatan dan unit militer di wilayah IKN. | TNI sebagai bagian vital dalam daerah komunikasi dimana hal tersebut didukung dengan komponen lainnya. | Penangkalan |
| | Daerah Belakang | | Penerapan Kodal sebagai bentuk membangun koordinasi taktis antara unit-unit pertahanan untuk melindungi daerah belakang dari serangan musuh. | K/L terkait memegang peranan penting di dalam penyediaan pasokan logistik yang diperlukan untuk mendukung | Pemulihan |

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|--|--|-------------|
| | | | | pasukan di garis depan. | |
| 2 | Non Militer | Zona Penyangga | K4IPP berperan dalam membangun sistem Kodal untuk melindungi wilayah dari ancaman non-militer sebagai wujud mendeteksi dan memantau aktivitas di zona penyangga. | K/L terkait sebagai <i>leading sector</i> tergantung ancaman yang dihadapi. Adapun TNI memiliki peran sebagai supporting dalam mendukung penanganan ancaman non militer. | Penangkalan |
| | | Zona Pertahanan Udara | K4IPP memiliki andil di dalam memperkuat deteksi atas ancaman non militer yang dapat mengganggu pertahanan udara. | TNI AU melaksanakan pengawasan udara, pemantauan radar, dan patroli udara untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman. Namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, TNI AU didukung oleh K/L terkait seperti Kemenhub dan LAPAN sehingga dapat menghadapi ancaman non militer dengan lebih baik. | Penangkalan |
| | | Zona Perlawanan | K4IPP dapat berperan dengan melakukan deteksi atas ancaman yang ada terutama non militer melalui radar, sensor, dan penginderaan jauh. | K/L terkait dapat memaksimalkan perannya dengan merancang kebijakan, koordinasi, dan pengawasan guna menghadapi ancaman non | Penindakan |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|-------------|
| | | | | militer. Namun peran TNI juga diperlukan sebagai komponen pendukung agar penanganan dapat lebih optimal. | |
| | | Daerah Pertempuran | K4IPP berperan dalam perencanaan dan mengoordinasikan operasi keamanan di daerah pertempuran, memastikan pertukaran informasi yang efektif, memantau situasi di lapangan untuk melawan ancaman non-militer, mendeteksi dan mengidentifikasi kegiatan yang mencurigakan serta memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan. | K/L terkait menjadi unsur penting dalam daerah pertempuran khususnya melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di IKN. Adapun TNI tetap memiliki peran penting dalam mendukung penanganan ancaman non militer pada zona pertempuran. | Penindakan |
| | | Daerah Komunikasi | K4IPP yakni melalui memperkuat sistem komando dan kendali, deteksi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. | BSSN berkoordinasi dengan Kominfo dan lembaga terkait lainnya dapat memperkuat daerah komunikasi sehingga dapat menekan terjadinya permasalahan. | Penangkalan |
| | | Daerah Belakang | K4IPP memiliki andil dalam mendukung operasi militer dengan meningkatkan deteksi dan membangun koordinasi. | K/L terkait dapat berperan penting di dalam memperkuat sistem komunikasi yang | Pemulihan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | digunakan untuk menghadapi ancaman non militer. Selain itu TNI sebagai komponen utama berperan dalam mendukung menghadapi ancaman non militer sesuai dengan tupoksinya. | |
|--|--|--|--|---|--|

Sumber: diolah penulis (2023)



Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

1. NAMA : Edi Saputra, , S.I.P., M.Han.
2. PANGKAT/KORPS : Kolonel Infanteri
3. NRP : 11940027940773
4. JABATAN : PAMEN DENMA MABESAD
5. TEMPAT/TGL LAHIR : Kuala Simpang / 26-07-1973
6. RIWAYAT JABATAN :



| NO | JABATAN | TMT |
|----|---|------------|
| 1 | DANTON KOSTRAD | 28-07-1994 |
| 2 | DANTON II/A YONIF 509/KOSTRAD BRIGIF 9/2/DARAKA YUDHA | 26-05-1995 |
| 3 | DANTON II/C YONIF 509/KOSTRAD BRIGIF 9/2/DARAKA YUDHA | 01-12-1995 |
| 4 | KASI-2 OPS YONIF 509/KOSTRAD BRIGIF 9/2/DARAKA YUDHA | 01-12-1999 |
| 5 | DANKIPAN C YONIF 509/KOSTRAD BRIGIF 9/2/DARAKA YUDHA | 01-09-2001 |
| 6 | PASIOPS REM 031/WB DAM I / BB | 01-10-2003 |
| 7 | WADAN YONIF 134/TS REM 031/WB DAM I /BB | 01-10-2005 |
| 8 | KASDIM 0314/BATAM DAM I/BB | 01-08-2007 |
| 9 | KASITER REM 142 / TATAG DAM XVI / HASANUDIN | 04-11-2010 |
| 10 | DANYONIF 408/SUBHRASTA REM 074 / WARA STRATAMA DAM IV | 11-03-2011 |
| 11 | PAMEN KHUSUS | 24-05-2013 |
| 12 | DANDIM 0725/SRAGEN DAM IV / DIPENOGORO | 17-01-2014 |
| 13 | KASREM 074 DAM IV / DIPENOGORO | 29-06-2015 |
| 14 | ASPERS DIVIF 1 KOSTRAD /PRAKASA VIRA GUFTI | 13-10-2015 |
| 15 | ASPERS KASDAM I/BB | 13-06-2017 |
| 16 | WADAN RINDAM XVII/CENDERAWASIH | 28-12-2018 |
| 17 | PAMEN MABESAD | 2020 |
| 18 | PABAN II / PUANTER STERAD | 04-02-2021 |
| 19 | WADANPUSDIKTER PUSTERAD | 18-03-2022 |
| 20 | PAMEN DENMABESAD | 10-03-2023 |

